



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2009

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Tahun 2009 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Selama tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan/keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa melalui kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan dan atau sesuai dengan penugasan dari Presiden.

Kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan selama tahun 2009 adalah penyusunan Rancangan RKP 2010 dan Rancangan RPJMN 2010-2014. Sedangkan kegiatan strategis lainnya seperti: 1) pelaksanaan telaah dan kajian latar belakang (*background study*) di berbagai sektor/bidang, untuk menjadi bahan atau masukan utama dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang disusun pada tahun 2009 (tahun kelima pelaksanaan Renstra 2005-2009); 2) evaluasi tahun ke empat pelaksanaan RPJMN 2004-2009 yang hasilnya menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014; 3) koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam; 4) Kesepakatan Jakarta (*Jakarta Commitment*) yang ditandatangani pada awal tahun 2009 di Kementerian PPN/Bappenas; 5) kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk merespon dampak dari perubahan iklim (*climate change*); 6) koordinasi hibah untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009, 7) pembinaan dan pendidikan para perencana di pusat (Bappenas dan Kementerian/Lembaga lainnya) dan daerah (Bappeda) melalui diklat gelar (S2 dan S3) di dalam dan di luar negeri, diklat non gelar (fungsional) dan upaya pembinaan lainnya bagi JFP; 8) evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bersama-sama perguruan tinggi, dan; 9) dukungan pelaksanaan dan koordinasi penyiapan substansi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Selain itu, untuk meningkatkan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai, Kementerian PPN/Bappenas terus melaksanakan reformasi birokrasi yang mencakup penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Pada tahun 2009, dokumen reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas telah dinilai oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan mendapat nilai 3,68 dari skala 4, tertinggi dari instansi lain yang dinilai pada tahun yang sama.

Secara umum, kegiatan Kementerian PPN/Bapenas tahun 2009 telah berhasil dilaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut merupakan bagian utuh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bapenas (LAKIP) Tahun 2009.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas pada tahun 2009.

Jakarta, Maret 2010.
MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

ARMIDA S. ALISJAHBANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Sumber Daya Manusia	7
1.5. Sumber Pendanaan	8
BAB II RENCANA STRATEGIS	10
2.1. Rencana Strategis Tahun 2005 - 2009	10
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2009	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Akuntabilitas Kinerja Sasaran dan Kegiatan	23
A. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	24
A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran	24
A.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan	26
B. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	59
B.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran	60
B.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan	64
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	74
C.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran	74
C.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan	75
D. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	76
D.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran	76
D.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan	77
E. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	79
E.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran	79
E.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan	80
3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	85
BAB IV PENUTUP	88
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1	: Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas.....	5
---------	---	---

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Rencana Strategis Tahun 2005 – 2009 Kementerian PPN/ Bappenas
- LAMPIRAN 2 : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2009 Kementerian PPN/ Bappenas
- LAMPIRAN 3 : Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2009 Kementerian PPN/
Bappenas
- LAMPIRAN 4 : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Kementerian PPN/ Bappenas

DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Profil Sumber Daya Manusia Tahun 2009	7
TABEL 2	: Pagu Anggaran Tahun 2009 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Menurut Program	8
TABEL 3	: Misi Tahun 2005 – 2009.....	11
TABEL 4	: Tujuan Tahun 2005 – 2009	11
TABEL 5	: Sasaran Tahun 2005 – 2009 Program Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	12
TABEL 6	: Sasaran Tahun 2005 – 2009 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Perencana Aparatur	12
TABEL 7	: Sasaran Tahun 2005 – 2009 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara	13
TABEL 8	: Sasaran Tahun 2005 – 2009 Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	13
TABEL 9	: Sasaran Tahun 2005 – 2009 Program Peningkatan Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara.....	13
TABEL 10	: Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran Tahun 2005 – 2009	14
TABEL 11	: Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	15
TABEL 12	: Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	15
TABEL 13	: Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara	16
TABEL 14	: Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	16
TABEL 15	: Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara	16
TABEL 16	: Penetapan Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	17
TABEL 17	: Penetapan Kinerja Sasaran Tahun 2009 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	17
TABEL 18	: Penetapan Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	19
TABEL 19	: Penetapan Kinerja Sasaran Tahun 2009 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	20
TABEL 20	: Penetapan Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	20
TABEL 21	: Penetapan Kinerja Sasaran Tahun 2009 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	21
TABEL 22	: Penetapan Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	21

TABEL 23	: Penetapan Kinerja Sasaran Tahun 2009 Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	21
TABEL 24	: Penetapan Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara	22
TABEL 25	: Penetapan Kinerja Sasaran Tahun 2009 Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara	22
TABEL 26	: Pengukuran Kinerja Sasaran Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	25
TABEL 27	: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009nProgram Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	27
TABEL 28	: Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2009 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	60
TABEL 29	: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	64
TABEL 30	: Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2009 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	74
TABEL 31	: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	75
TABEL 32	: Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2009 Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	76
TABEL 33	: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	77
TABEL 34	: Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2009 Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara	79
TABEL 35	: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara	81
TABEL 36	: Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Sampai Dengan Akhir Desember Tahun 2009	87

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan melaksanakan tugas-tugas lainnya dari Presiden, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2005-2009. Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan. Tahun 2009 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Periode 2005-2009.

Dalam Renstra periode 2005-2009 disebutkan 2 tujuan yang akan dicapai, yaitu: 1) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan RPJMN 2004-2009, 2) memantapkan peran dan keikutsertaan Kementerian PPN/Bappenas dalam pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam perencanaan pembangunan. Kedua tujuan tersebut berupaya dicapai melalui program dan kegiatan-kegiatan pada masing-masing program. Pada tahun 2009, program-program yang digunakan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu: 1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, 4) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; dan 5) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Setiap program tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang relevan dengan indikator kinerja *output* dan targetnya, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, meliputi : 1. Rancangan RKP (2010) 2. Rancangan RPJMN 2010-2014 dengan memasukan Visi dan Misi Presiden terpilih (telah mulai disusun pada akhir tahun 2008, dan dilanjutkan pada tahun 2009)	Jumlah dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional : 1. Dokumen Rancangan RKP (2010) 2. Dokumen Rancangan akhir RPJMN 2010-2014 (telah mulai disusun pada akhir tahun 2008, dan dilanjutkan pada tahun 2009)	2 dokumen

**TABEL PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
2	<p>Pengkajian Bidang Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/telaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/sector sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJMN 2010-2014). - Kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/bidang, lintas bidang/sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah. 	<p>Jumlah Dokumen Pengkajian Bidang Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/telaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/sector sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJMN 2010-2014 - Dokumen kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/bidang, lintas bidang/sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah. 	<p>1 dokumen berisi berbagai sektor/bidang pembangunan</p> <p>1 dokumen berisi berbagai sektor/bidang pembangunan</p>
3	<p>Koordinasi strategis perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus) - Musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi 	<p>Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus) - Dokumen musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi 	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>
4	<p>Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi 4 tahun pelaksanaan RPJMN 2005-2009 - Evaluasi pelaksanaan RKP 2008 	<p>Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen evaluasi 4 tahun pelaksanaan RPJMN 2005-2009 - Laporan evaluasi pelaksanaan RKP 2008 	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>
5.	<p>Koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/Pemerintah, antara lain:</p>	<p>Dokumen koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/Pemerintah, antara lain:</p>	
	a. Koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/Project (STAR-SDP)</i>	Dokumen koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/ Project (STAR SDP)</i>	1 dokumen
	b. Koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	Dokumen koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1 dokumen
	c. Koordinasi pengembangan <i>good governance</i> melalui sosialisasi dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	Dokumen sosialisasi <i>good governance</i> dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	1 dokumen
	d. Koordinasi program RAN PK di tingkat pusat dan daerah.	Dokumen koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan RAN PK di pusat dan daerah.	1 dokumen
	e. Koordinasi penyusunan Jakarta Commitment dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	Dokumen koordinasi penyusunan Jakarta Commitment dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	1 dokumen

**TABEL PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
	f. Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	Dokumen koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	1 dokumen
	g. Koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	Dokumen koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	1 dokumen
	h. Koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	Dokumen koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	1 dokumen
	i. Koordinasi penyusunan Buku Pegangan (<i>Handbook</i>) Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah tahun 2009	Dokumen koordinasi penyusunan Buku Pegangan (<i>handbook</i>) Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah tahun 2009	1 dokumen
	j. Koordinasi penataan ruang	Dokumen koordinasi penataan ruang	1 dokumen
	k. Koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam	Dokumen koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam	1 dokumen
	l. Koordinasi kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dokumen kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen
	m. Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/ Bappenas	Dokumen Pemantauan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/ Bappenas	1 dokumen

Seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sumber-sumber pendanaan pemerintah (melalui APBN) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPN 2005-2025, RPJM 2004-2009, dan RKP 2009.
- 2) Pedoman reformasi birokrasi nasional belum solid dan komprehensif sehingga belum dapat dijadikan acuan sepenuhnya dalam pengembangan manajemen kinerja di Kementerian PPN/ Bappenas.

Melihat permasalahan atau hambatan pokok tersebut di atas, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasinya, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan terus peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
- 2) Mendorong kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk turut membiayai pembangunan antara lain pembiayaan barang-barang publik (*public goods*) yang memerlukan investasi besar, seperti pembangunan infrastruktur berskala besar. Dalam hal ini, Pemerintah dan Swasta telah menyusun rencana usulan pembangunan infrastruktur berskala besar yang diterbitkan dalam *Public Private Partnersip* (PPP) Book, merumuskan konsep kebijakan PPP, dan membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI).
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas agar lebih mampu dan cepat dalam memprediksi atau mendeteksi secara dini (*early warning system*) perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional serta mengambil langkah-langkah antisipatif.
- 4) Melanjutkan reformasi birokrasi dengan fokus pada pengembangan manajemen kinerja sesuai dengan dokumen Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda atau LAKIP K/L) disusun sesuai amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP memuat ringkasan keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan (kinerja kegiatan) dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari masing-masing program (kinerja hasil) sesuai dengan dokumen pelaksanaan APBN/APBD yang telah ditetapkan. Pada tahun 2010, Kementerian PPN/Bappenas menyusun kembali laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 dalam bentuk LAKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009 yang merupakan laporan pelaksanaan tahun ke-5 (kelima) atau tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode 2005-2009.

Pada tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas selain melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di bidang perencanaan, yaitu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tersebut, juga melaksanakan berbagai kegiatan lainnya sesuai penugasan dari Presiden. Semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama dan strategis yang berdampak pada kinerja pembangunan nasional. Berbeda dengan kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki tugas dengan bidang yang nyata, mudah dilihat dan diukur kinerjanya (*tangible products*), kegiatan utama atau strategis dari Kementerian PPN/Bappenas cenderung lebih bersifat *intangible product* dan relatif sulit diukur baik keluarannya (*output*) maupun hasilnya (*outcome*). Sebagai contoh, keluaran (*output*) utama Kementerian PPN/Bappenas adalah dokumen konsep/rancangan rencana pembangunan nasional (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah/RKP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP), dan akan berubah menjadi hasil (*outcome*) setelah semua rancangan tersebut dibahas dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan baik oleh pemerintah atau oleh Pemerintah dan DPR, menjadi RKP, RPJM dan RPJP. Selanjutnya, setelah rencana pembangunan tersebut dilaksanakan dan terlihat

kinerjanya, maka hasil langsung dan ataupun tidak langsung dari pelaksanaan tersebut dapat dianggap sebagai dampak (*impact*). Pada umumnya, dampak tidak terlihat dalam jangka pendek tetapi terlihat dalam jangka menengah atau bahkan jangka panjang.

Beberapa kegiatan utama dan strategis Kementerian PPN/Bappenas tahun 2009 antara lain: 1) pelaksanaan telaah dan kajian latar belakang (*background study*) di berbagai sektor/bidang, untuk menjadi bahan atau masukan utama dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pada tahun 2009 (tahun kelima pelaksanaan Renstra 2005-2009); 2) evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 yang hasilnya menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014; 3) koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam; 4) kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk merespon dampak dari perubahan iklim (*climate change*); 5) bersama-sama dengan Kementerian Keuangan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan para lembaga donor baik bilateral maupun multilateral dalam Kesepakatan Jakarta (*Jakarta Commitment*) yang ditandatangani pada awal tahun 2009 di Kementerian PPN/Bappenas; 6) pembinaan dan pendidikan para perencana di pusat (Bappenas dan K/L lainnya) dan daerah (Bappeda) melalui diklat gelar (S-2 dan S3) di dalam dan di luar negeri, diklat non gelar (fungsional) dan upaya pembinaan lainnya bagi JFP; 7) koordinasi bantuan (hibah) para lembaga donor/mitra untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009; dimana Bappenas menjadi koordinator mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat mengelola bantuan hibah (*grant*) dari lembaga mitra; 8) evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bersama-sama perguruan tinggi; 9) Evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK); 10) dukungan pelaksanaan dan koordinasi penyiapan substansi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN); 11) pengembangan *Good Governance Index* (GGI) yang difokuskan pada penerapan fungsi-fungsi manajemen di instansi pusat dan daerah; 12) koordinasi pelaksanaan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia; 13) persiapan dalam pembuatan proposal untuk mendapatkan hibah *Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact* dari Pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, untuk mendukung berbagai pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas dan dalam rangka reformasi birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas terus mengembangkan manajemen kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga, unit kerja, dan individu.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101 dan 103 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Keppres Nomor 2 dan 3 Tahun 2002, dan diubah kembali melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 dan 12 Tahun 2005, dan terakhir diubah kembali melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi di perencanaan pembangunan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas tersebut dijabarkan ke dalam beberapa fungsi, sebagai berikut :

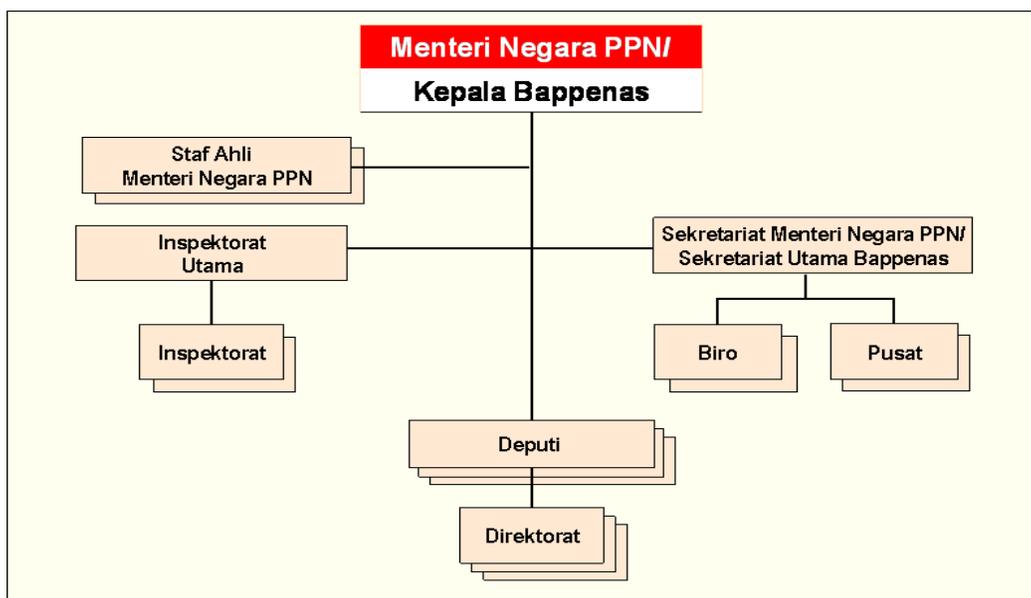
- 1) penyusunan rencana pembangunan nasional;
- 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas;
- 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari 16 unit kerja eselon I (1 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, 9 Kedeputian, 1 Inspektorat Utama, dan 5 Staf Ahli Kementerian PPN), 51 unit kerja eselon II (5 biro, 2 pusat, 41 direktorat, dan 2 inspektorat), 162 unit kerja eselon III (17 bagian, 138 sub direktorat, dan 7 bidang), dan 55 unit kerja eselon IV (sub bagian).

Unit kerja eselon IV hanya ada di Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Tata Usaha Kedeputian, dan Inspektorat, sedangkan di kedeputian sejak tahun 2004 ditiadakan dan diganti dengan jabatan struktur fungsional perencana (JFP). Pertimbangan penghapusan jabatan eselon IV di kedeputian adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang perencanaan pembangunan. Diharapkan dengan penghapusan jabatan eselon IV dan pengembangan JFP tersebut akan mendorong peningkatan kinerja para pegawai khususnya pegawai yang menjabat fungsional perencana.

Bagan 1
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Struktur organisasi di atas dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas khususnya dalam melaksanakan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2005-2009, dan dimungkinkan adanya penyempurnaan sebagai antisipasi terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Secara singkat uraian tugas pokok dan fungsi unit kerja eselon I adalah sebagai berikut:

1) Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Menangani perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan yang meliputi bidang kesehatan, gizi masyarakat, agama, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

2) Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Menangani perencanaan bidang pembangunan politik, komunikasi, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, pertahanan, dan keamanan.

3) Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Menangani perencanaan bidang pembangunan yang meliputi penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, pengembangan kesempatan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Kedeputian Bidang Ekonomi

Menangani perencanaan bidang pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan, analisis moneter, perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi internasional, industri, iptek, dan BUMN.

5) Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Menangani perencanaan bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi pangan, pertanian, kehutanan, konservasi sumber daya air, kelautan, perikanan, sumber daya mineral, pertambangan, dan lingkungan hidup.

6) Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Menangani perencanaan bidang pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi pengairan, irigasi, transportasi, permukiman, perumahan, energi, telekomunikasi, informatika, dan pengembangan kelembagaan prasarana publik.

7) Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Menangani perencanaan bidang pengembangan regional dan otonomi daerah yang meliputi pengembangan wilayah, kawasan khusus dan daerah tertinggal, otonomi daerah, perkotaan, pedesaan, tata ruang, dan pertanahan.

8) Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Menangani perencanaan bidang pendanaan pembangunan yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan luar negeri bilateral, pendanaan luar negeri multilateral, dan pendayagunaan pendanaan pembangunan.

9) Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja pembangunan

Melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan nasional meliputi perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kinerja pembangunan daerah, pembangunan sektoral dan lintas sektoral serta menyiapkan kebijakan di bidang evaluasi kinerja pembangunan.

10) Inspektorat Utama

Menangani pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan, pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan; pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan; pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

11) Sekretariat Menteri PPN/Sestama Bappenas

Menangani koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi koordinasi kegiatan, penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

12) Staf Ahli Menteri PPN

Memberikan telaahan mengenai masalah sesuai bidangnya masing-masing (bidang hukum dan reformasi birokrasi, bidang revitalisasi perdesaan, pertanian dan agroindustri, bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, bidang mitigasi dan penanggulangan bencana, bidang tata ruang dan kemaritiman), serta membantu Menteri PPN dalam merumuskan kebijaksanaan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya masing-masing.

1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas relatif tidak banyak apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan September 2009, kekuatan sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas adalah sebanyak 838 orang, terdiri dari 746 orang pegawai organik dan 61 orang pegawai non organik. Dari jumlah tersebut, terdapat 225 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 582 orang merupakan staf. Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai Bappenas (data per Pebruari 2009) adalah 76 orang S3 (9,1%), 282 orang S2 (33,7%), 215 orang S1 (27,7%), 29 orang Sarjana Muda/D3 (3,5%), 175 orang SLTA (20,9%), dan 61 orang SLTP/SD (7,2%) sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2009
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN						TOTAL
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP/SD	
IV	71	193	18	-	-	-	282
III	5	89	187	13	58	-	352
II	-	-	10	16	115	31	272
I	-	-	-	-	2	4	6
Jumlah	76	282	215	29	175	61	838
Persentase	9,1%	33,7%	25,7%	3,5%	20,9%	7,2%	100%

Sumber : Bappenas, September 2009

1.5. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2009, Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 601.977 miliar meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 309.924 miliar (termasuk gaji PNS) dan anggaran PHLN sebesar Rp. 292.053 miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan 7 (tujuh) program pembangunan (Tabel 2).

Tabel 2
PAGU ANGGARAN TAHUN 2009
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT PROGRAM

(dalam juta rupiah)

NO	PROGRAM	PAGU		
		RUPIAH MURNI	PHLN	JUMLAH
A.	Anggaran 55	265.887.779.000	134.822.322.000	400.710.101.000
1.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	141.174.879.000	54.822.322.000	195.997.201.000
		72%	28%	100%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	31.200.000.000	80.000.000.000	111.200.000.000
		28%	72%	100%
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	20.308.700.000	-	27.479,736
		100%	-	100%
4.	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	69.704.200.000	-	63.801,957
		100%	-	100%
5.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	3.500.000.000	-	3.500,020
		100%	-	100%
B.	Anggaran 69	44.037.139.000	157.230.642.000	201.267.781.000
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat	15.028.103.500	157.230.642.000	172.258.745.500
		9%	91%	100%
7.	Program Pembiayaan Lain-Lain	29.009.035.000	-	29.009.035.000
		100%	-	100%
Jumlah		309.924.918.000	292.052.964.000	601.977.882.000
		51%	49%	100%

Sumber : Diolah dari Laporan Pemantauan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Desember 2009.

Sebenarnya jumlah anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada setiap tahunnya tidak semuanya digunakan untuk kegiatan Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan termasuk evaluasi kinerja pembangunan. Sekitar 50% dari anggaran tersebut dipakai untuk melaksanakan kegiatan lainnya sesuai penugasan dari Presiden/Pemerintah, antara lain pengembangan SDM perencana di pusat dan daerah melalui diklat gelar dan non gelar; penyusunan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (*public-private partnership*) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang kemudian akan diperluas ke bidang lainnya; koordinasi dengan instansi lain dalam penanganan kemiskinan, dampak perubahan iklim (*climate change*), koordinasi bantuan (hibah) luar negeri dari lembaga donor/mitra untuk mendukung Pemilu 2009, dan koordinator (*Investment Loan Management Unit*) dalam melaksanakan *State Audit Reform-Sectoral Development Program/Project* yang mengkoordinasikan berbagai lembaga di pusat dan daerah (Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPR dan Bawasda) antara lain dalam membangun audit keuangan dan audit kinerja melalui pembentukan program studi S1 dan S2 bidang akuntansi pemerintahan dan pemberian beasiswa bagi para auditor untuk mengikuti pendidikan S2 di 36 perguruan tinggi negeri dan swasta. Sebagian anggaran 999 tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan nasional pemberdayaan masyarakat khususnya di daerah.

Semua penugasan tersebut membuat beban kerja Kementerian PPN/Bappenas semakin berat, tidak hanya pada tanggung jawab untuk mencapai pencapaian *output* dan *outcome* kegiatannya, tetapi juga akuntabilitas dalam pengelolaan anggarannya. Selain itu, penugasan tersebut menuntut SDM Bappenas untuk mampu membagi waktu secara efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan di bidang-bidang lainnya. Kondisi ini sering menyebabkan SDM Bappenas bekerja di luar jam kerja, baik pada malam hari atau pada hari-hari libur.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2005 – 2009

1. Visi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Rentsra 2005-2009. Visi tersebut adalah:

“Menjadi institusi perencana yang handal, kredibel dan secara proaktif ikut berperan dalam penentuan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”.

Sebagai lembaga perencana, Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang dapat diandalkan dalam arti dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan bangsa, dan dapat diimplementasikan serta mampu mengantisipasi tantangan global. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas harus menjadi institusi perencana yang **handal**, dalam arti memiliki kemampuan tinggi dan siap melaksanakan berbagai tugas yang dibebankan kepadanya, dengan baik dan akuntabel. Kemudian, Kementerian PPN/Bappenas menjadi lembaga yang **kredibel** dalam arti dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus mendasarkan pada kompetensi, profesionalisme, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kementerian PPN/Bappenas juga harus secara **proaktif** mampu dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang handal, kredibel dan proaktif tersebut harus tercermin dalam berbagai kegiatan seperti analisis kebijakan dan atau kajian pembangunan nasional, perencanaan, panganggaran serta penanganan masalah mendesak (peran pengambil keputusan, dan sebagai *think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan (peran sebagai koordinator dan administrator). Uraian lebih rinci mengenai Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005 – 2009 disampaikan pada Lampiran 1.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan beberapa misi, sebagai berikut :

Tabel 3 MISI TAHUN 2005 - 2009 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
NO	TUJUAN
1	Meningkatkan kualitas rancangan kebijakan dan penentuan arah pembangunan nasional dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
2	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan <i>stakeholders</i> untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional.
3	Mewujudkan institusi perencana sebagai mitra dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan nasional lainnya.
4	Mengembangkan kapasitas, potensi, dan kompetensi nasional dalam perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.

3. Tujuan

Misi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2005-2009, sebagai berikut:

Tabel 4 TUJUAN TAHUN 2005 - 2009 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
NO	TUJUAN
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan nasional sesuai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
2	Memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin tujuan bernegara.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan beberapa sasaran strategis, yang dapat diukur dengan indikator-indikatornya masing-masing sebagaimana tercermin dalam Tabel 6, 7, 8, 9, dan 10 di bawah ini.

Tabel 5 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggarannya	Persentase rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan perencanaan pembangunan nasional
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden	Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dari Presiden

Tabel 6 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANA APARATUR		
NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan potensi dan kompetensi sumber daya manusia disertai dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas
		Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia perencana di instansi lainnya, pusat dan daerah

Tabel 7 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA		
NO	SASARAN	INDIKATOR

1	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang mengikuti teknologi yang mutakhir, berkualitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sumber daya manusia perencanaan	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan aset fasilitas kerja Kementerian PPN/Bappenas
---	---	---

Tabel 8 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM PENERAPAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK		
NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan pelayanan umum melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja	Persentase peningkatan pelayanan umum di Kementerian PPN/Bappenas
		Persentase kualitas pembinaan pengelolaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Tabel 9 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA		
NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Menyelenggarakan pengawasan aparatur dalam mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, <i>think tank</i> , koordinator, dan administrator	Berkurangnya temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal
		Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan dan kinerja

4. Kebijakan dan Program

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas, dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program, seperti tampak dalam Tabel 11. Kebijakan disusun berdasarkan pemikiran dan kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan program yang digunakan adalah sesuai dengan program yang tersedia di dalam sistem penganggaran – APBN dan bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh semua kementerian dan lembaga (K/L). Idealnya, Kementerian PPN/Bappenas memiliki program yang spesifik dan sesuai tupoksinya yaitu perencanaan pembangunan nasional, sehingga sangat relevan untuk mengukur kinerja program dan kegiatannya serta sesuai dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja. Untuk itu, dalam RPJM 2010-2014, setiap K/L (sebagian sudah) memiliki program-program (dibagi dalam program teknis dan program generic) yang relevan dengan bidang tugasnya sehingga

memudahkan dalam pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerjanya. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dapat dilakukan dengan lebih baik.

<p style="text-align: center;">Tabel 10 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2005 – 2009 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</p>		
NO	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Mendorong peningkatan kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil pemantaun, dan evaluasi program pembangunan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan dan fungsi kelembagaan, khususnya sinkronisasi dan sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan	
3	Pengembangan proses partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penerapan sistem keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat	
4	Pemantapan posisi perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya	
5	Penataan organisasi Bappenas sesuai dengan kompetensi lembaga serta pengembangan mekanisme kerja, penerapan sistem manajemen organisasi dan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada semua jajaran guna mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, <i>think tank</i> , koordinator, dan administrator	
6	Peningkatan kemampuan teknis dan strategis lembaga dan SDM perencana tingkat pusat dan daerah baik dalam <i>domain of expertise (hardskills</i> maupun <i>domain of competencies (soft skills)</i>	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
7	Meningkatkan akses dan penguasaan data/informasi statistik, hasil-hasil kajian, peta wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
8	Penataan organisasi Bappenas melalui pengembangan budaya organisasi, yang dijabarkan dalam nilai inti budaya, dan kode etik profesi perencana pembangunan	Penerapan Pemerintahan yang Baik
9	Pelaksanaan pengawasan dan audit yang teratur disertai dengan penegakkan peraturan yang berlaku secara bertahap untuk meningkatkan akuntabilitas aparatur	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

5. Program dan Kegiatan

Selanjutnya, kelima program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang relevan, sebagaimana tercermin dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 11 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
KEGIATAN 1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan kajian tentang perencanaan pembangunan nasional - Kegiatan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional
KEGIATAN 2	Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja Kementerian PPN/Bappenas dengan kementerian/lembaga di pusat dan lembaga perencanaan di daerah, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan nasional - Kegiatan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional
KEGIATAN 3	Penciptaan sistem administrasi pendukung dan basis data perencanaan pembangunan nasional yang efektif <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penyusunan dan pengembangan sistem basis data perencanaan pembangunan nasional

Tabel 12 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
Kegiatan koordinasi dalam rangka mendukung proses, pendidikan, pembinaan, dan pelatihan sumber daya manusia perencana meliputi :	
KEGIATAN 1	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian PPN/Bappenas
KEGIATAN 2	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perencana di instansi pemerintah pusat dan daerah
KEGIATAN 3	Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia perencana di Kementerian PPN/Bappenas
KEGIATAN 4	Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah pusat dan daerah

Tabel 13 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
Kegiatan Koordinasi dalam rangka mendukung pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan meliputi :	
KEGIATAN 1	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan
KEGIATAN 2	Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional

--	--

Tabel 14 PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
Kegiatan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas meliputi :	
KEGIATAN 1	Pengelolaan pelayanan umum (administrasi keuangan, dan sebagainya) dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dan pegawai
KEGIATAN 2	Pengelolaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Tabel 15 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
Kegiatan koordinasi dalam rangka meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan, tindaklanjut temuan dan sistem informasi hasil pengawasan, meliputi :	
KEGIATAN 1	Pengawasan atas pengelolaan kinerja dan keuangan Kementerian PPN/Bappenas
KEGIATAN 2	Pemeriksaan dan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas
KEGIATAN 3	Pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian internal pemerintah

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2009

Renstra Kementerian PPN/Bappenas merupakan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, dan dijabarkan dan dilaksanakan dengan rencana tahunan yang disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT berisi rencana kinerja sasaran dan rencana kinerja kegiatan beserta indikator-indikatornya. Rencana Kinerja Sasaran Kementerian PPN/Bappenas secara rinci terlihat pada Tabel 16, 18, 20, 22, dan 24, serta Rencana Kinerja Kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 17, 19, 21, 23, dan 25.

Tabel 16 PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2009 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggaran nasional	% rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan antara lain RKP 2010 dan konsep RPJMN 2010-2014	100 %
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden	% tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dari Presiden	100 %

Tabel 17
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, meliputi : 1. Rancangan RKP (2010) 2. Rancangan RPJMN 2010-2014 dengan memasukan Visi dan Misi Presiden terpilih (telah mulai disusun pada akhir tahun 2008, dan dilanjutkan pada tahun 2009)	Jumlah dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional : 1. Dokumen Rancangan RKP (2010) 2. Dokumen Rancangan akhir RPJMN 2010-2014 (telah mulai disusun pada akhir tahun 2008, dan dilanjutkan pada tahun 2009)	2 dokumen
2	Pengkajian Bidang Pembangunan - <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/telaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/sector sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014). - Kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/bidang, lintas bidang/sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah.	Jumlah Dokumen Pengkajian Bidang Pembangunan - Dokumen <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/telaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/sector sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014 - Dokumen kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/bidang, lintas bidang/sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah.	1 dokumen berisi berbagai sector/bidang pembangunan 1 dokumen berisi berbagai sector/bidang pembangunan
3	Koordinasi strategis perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi : - Koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus) - Musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi : - Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus) - Dokumen musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi	1 dokumen 1 dokumen
4	Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi : - Evaluasi 4 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Evaluasi pelaksanaan RKP 2008	Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi : - Dokumen evaluasi 4 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Laporan evaluasi pelaksanaan RKP 2008	1 dokumen 1 dokumen

Tabel 17
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
5.	Koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/Pemerintah, antara lain:	Dokumen koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/Pemerintah, antara lain:	
	a. Koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/Project</i> (STAR-SDP)	Dokumen koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/ Project</i> (STAR SDP)	1 dokumen
	b. Koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	Dokumen koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1 dokumen
	c. Koordinasi pengembangan <i>good governance</i> melalui sosialisasi dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	Dokumen sosialisasi <i>good governance</i> dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	1 dokumen
	d. Koordinasi program RAN PK di tingkat pusat dan daerah.	Dokumen koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan RAN PK di pusat dan daerah.	1 dokumen
	e. Koordinasi penyusunan Jakarta Commitment dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	Dokumen koordinasi penyusunan Jakarta Commitment dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	1 dokumen
	f. Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	Dokumen koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	1 dokumen
	g. Koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	Dokumen koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	1 dokumen
	h. Koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	Dokumen koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	1 dokumen
	i. Koordinasi penyusunan buku pegangan (<i>handbook</i>) Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah tahun 2009	Dokumen koordinasi penyusunan buku pegangan (<i>handbook</i>) Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah tahun 2009	1 dokumen
	j. Koordinasi penataan ruang	Dokumen koordinasi penataan ruang	1 dokumen
k. Koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam	Dokumen koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam	1 dokumen	
	l. Koordinasi kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dokumen kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen
	m. Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas	1 dokumen

Tabel 18
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2009
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana dan kapasitas instansi perencanaan di pusat dan di daerah.	% alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang studi S2/S3.	80 %
		% alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah.	80 %
		% alumni diklat non gelar substantif yang dinilai mampu melakukan aplikasi pengetahuan hasil diklat ke dalam proses penyusunan rencana.	80 %
		% alumni diklat non gelar penjenjangan fungsional perencana yang telah diangkat ke dalam atau naik ke jenjang jabatan perencana yang lebih tinggi.	80 %
		% perencana (JFP) memahami dokumen peraturan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas serta pengumpulan angka kreditnya.	80 %
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian PPN/ Bappenas.	% pegawai merasakan relevansi yang positif antara diklat pegawai dengan peningkatan kompetensi pegawai Bappenas.	80 %
		% penilaian pejabat eselon I dan II yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat.	80 %

Tabel 19
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri	Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri	511 orang
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP	Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP	1.192 orang

Tabel 19
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
3.	Penyusunan dokumen pengaturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana di seluruh Indonesia	Jumlah dokumen yang mengatur pelaksanaan jabatan fungsional perencana di seluruh Indonesia	1 dokumen
4.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan 	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan 	39 orang 625 orang 59 orang 40 orang

Tabel 20
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2009
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai	% sarana dan prasarana serta fasilitas kerja pendukung lainnya yang tersedia dengan baik	65%
2.	Kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir	Waktu yang digunakan untuk mengakses data/informasi mutakhir	5 detik

Tabel 21
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1.	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian PPN/Bappenas	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian PPN/ Bappenas	40 %
2.	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	70 %

Tabel 21
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
3.	Menyediakan kelengkapan data/informasi yang diperlukan	% Kelengkapan data/informasi yang diperlukan	70 %

Tabel 22
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2009
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	% peningkatan kualitas pelayanan umum di Kementerian PPN/Bappenas	30 %

Tabel 23
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1.	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100 %
2.	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan pelayanan umum untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pelayanan umum lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	100 %
3.	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian PPN/Bappenas	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian PPN/Bappenas	100 %

Tabel 24
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2009
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	Pengurangan temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal	40 %
		Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian

Tabel 25
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1.	Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja Tupoksi Kelembagaan yang Dihasilkan pada Tahun 2009.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan yang dihasilkan pada tahun 2009.	9 LHP
2.	Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan dan Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan.	Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan tupoksi kelembagaan.	40%
3.	Pengembangan atau Penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen	Jumlah masukan pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian manajemen	4 Masukan
4.	Identifikasi Peraturan yang Bermasalah dalam Pengelolaan Anggaran dan Pengelolaan Tupoksi Kelembagaan.	Jumlah peraturan yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan tupoksi kelembagaan.	6 buah
5.	Reviu atas Laporan Keuangan, LAKIP dan TOR/RAB	Jumlah Laporan Reviu atas laporan keuangan, LAKIP dan TOR/RAB	4 Lap
6.	Seminar Ketaatan	Jumlah seminar ketaatan yang dilaksanakan	6 Kali

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN DAN KEGIATAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam mencapai sasaran program (sasaran sesuai dengan program yang menjadi tanggungjawab Kementerian PPN/Bappenas) dan sasaran kegiatan (sasaran dari keluaran kegiatan) pada tahun 2009 sesuai dengan Rencana Strategis 2004-2009 dan Rencana Kinerja Tahun 2009 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II. Pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2009 merupakan pencapaian target kinerja tahun terakhir dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2004-2009.

Dalam tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas sesuai target Renstra 2004-2009 telah menghasilkan dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan tahunan (RKP) 2010 serta rancangan kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya. Dokumen rancangan RPJMN disusun dengan menjabarkan visi, misi dan program Presiden terpilih yang selanjutnya menjadi muatan kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen tersebut. Pada tahun 2009, rancangan RPJMN 2010-2014 menjadi acuan bagi pelaksana pemerintah baik di tingkat pusat (kementerian/Lembaga) maupun daerah (propinsi/kab/kota) untuk menyusun Renstra KL dan RPJM Daerah. Pada bulan Januari 2010, rancangan RPJMN 2010-2014 ditetapkan menjadi RPJMN 2010-2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009 seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas diukur melalui pelaksanaan program yang menjadi tanggungjawab Kementerian PPN/Bappenas. Hasil pencapaian kinerja untuk sasaran program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan merupakan program yang berisi kegiatan-kegiatan utama Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana pembangunan di berbagai bidang. Karena itu, jumlah anggaran untuk program ini relatif besar dan digunakan oleh sebagian besar unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas khususnya unit kerja yang menangani perencanaan pembangunan nasional. Sebenarnya program ini dan 4 program lainnya merupakan program generik, untuk semua kementerian dan lembaga (K/L), dan tidak sesuai dengan bidang perencanaan. Namun karena dalam sistem penganggaran yang berlaku hingga saat ini (tahun 2010 masa transisi) belum ada program yang khusus untuk lembaga perencanaan, maka Bappenas menggunakan program generik tersebut. Untuk RPJMN 2010-2014, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan telah menyusun program-program yang spesifik untuk setiap K/L agar sesuai dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja. Dalam Renstra 2010-2014, Kementerian PPN/Bappenas akan menggunakan 1 (satu) program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaannya, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan program teknis; dan 4 program generic yang bersifat pendukung, yaitu: 1) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik; 2) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan 4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

A.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pada tahun 2009 sasaran strategis yang dicapai adalah meningkatkan kualitas perencanaan strategis dan penganggaran pembangunan nasional sebagaimana tabel di bawah ini. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut: a) rancangan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur; b) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN 2010-2014 dengan RPJPN 2005-2025; c) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih; d) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2010 dengan RPJMN 2010-2014; e) % kesesuaian rancangan Renstra K/L dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN 2010-2014; f) % kesesuaian rancangan Renja K/L dengan target/sasaran dalam RKP 2010; dan g) % tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas lainnya (penugasan dari Pemerintah/ Presiden).

Adapun hasil pencapaian target atau sasaran program pada tahun 2009 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 26 PENGUKURAN KINERJA SASARAN PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan strategis dan penganggaran pembangunan nasional	% rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan antara lain dalam RKP 2010 dan rancangan RPJMN 2010-2014	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden	% tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas lainnya (penugasan dari Pemerintah/ Presiden)	90 %	90%	100 %

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing target sesuai sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai dapat dijelaskan pencapaian kinerjanya sebagai berikut:

1. Persentase rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan antara lain dalam RKP 2010 dan rancangan RPJMN 2010-2014 telah dicapai sebesar 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) untuk kinerja: “rancangan RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur” telah berhasil mencapai target 100%. Sesuai dengan pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional bahwa muatan rencana pembangunan nasional (RPJMN 2010-2014 dan RKP-RKP nya) memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur agar dapat menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional;
 - b) untuk kinerja: “% kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN 2010-2014 dengan RPJPN 2005-2025”, telah dicapai sebesar 100%. Pencapaian tersebut diukur dari amanat RPJPN 2005-2025 yang telah dijabarkan dalam rancangan RPJMN 2010-2014;
 - c) untuk kinerja: “% kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN 2010-2014 dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih”, telah berhasil dicapai sebesar 100%. Hal ini ditunjukkan dengan telah dijabarkannya visi, misi dan program kerja Presiden terpilih ke dalam kegiatan prioritas RPJMN 2010-2014;

- d) untuk kinerja: “% kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2010 dengan rancangan RPJMN 2010-2014”, telah berhasil dicapai sebesar 100%. Hal ini ditunjukkan dengan telah dijabarkannya muatan rancangan RPJMN 2010-2014 ke dalam RKP 2010;
 - e) untuk kinerja: “% kesesuaian rancangan Renstra K/L 2010-2014 dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN 2010-2014”, telah berhasil dicapai sebesar 100%. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh rancangan Renstra K/L periode 2010-2014 telah mengikuti arahan kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam rancangan RPJMN 2010-2014. Kesesuaian ini harus dijaga agar program dan kegiatan setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangan dan tugas, dan mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2010-2014.
 - f) untuk kinerja: “% kesesuaian rancangan Renja K/L dengan target/sasaran dalam RKP 2010” telah dicapai sebesar 100%. Hal ini juga ditunjukkan dengan kesesuaian rancangan Renja K/L dengan target/sasaran dalam RKP 2010 yang dilakukan melalui proses trilateral *meeting* antara Kementerian PPN/Bappenas, mitra kerja (K/L) dan Kementerian Keuangan.
2. Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas lainnya (penugasan dari Pemerintah/ Presiden) telah dicapai sebesar 100%. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya berbagai koordinasi strategis lintas sektoral/regional antara lain untuk mendukung kegiatan dalam penanganan bencana alam dan perubahan iklim global.

A.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Tabel 28 berisi hasil pengukuran kinerja kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dalam Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

<p>Tabel 27 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</p>

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1.	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Nasional, meliputi : 1. Rancangan RKP (2010) 2. Rancangan RPJMN 2010-2014 yang memuat Visi dan Misi Presiden terpilih (disusun pada akhir tahun 2008, dan dilanjutkan pada tahun 2009, dan awal tahun 2010)	Jumlah dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional : 1. Dokumen Rancangan RKP (2010) 2. Dokumen Rancangan RPJMN 2010-2014	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2.	Kajian Bidang Pembangunan - <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/telaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/sector sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014). - Kajian pembangunan (isu strategis dan prakarsa strategis) bersifat sektoral/ bidang, lintas bidang/sektoral maupun daerah/wilayah dan lintas wilayah.	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Pembangunan - Dokumen <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/elaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/sector sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014 - Dokumen kajian pembangunan (isu strategis dan prakarsa strategis) bersifat sektoral/bidang, lintas bidang/sektoral maupun daerah/wilayah dan lintas wilayah.	1 dokumen berisi berbagai sektor/bidang pembangunan 1 dokumen berisi berbagai sektor/bidang pembangunan	1 dokumen berisi berbagai sektor/bidang pembangunan 1 dokumen berisi berbagai sektor/bidang pembangunan	100 % 100 %
3.	Koordinasi strategis perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi : - Koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus) - Musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi : - Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus) - Dokumen musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 % 100 %
4.	Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi : - Evaluasi 4 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Evaluasi RKP 2008	Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi : - Dokumen evaluasi 4 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Laporan evaluasi RKP 2008	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 % 100 %
5.	Koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/Pemerintah, antara lain:	Dokumen koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/Pemerintah, antara lain:			
	a. Koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/Project</i> (STAR-SDP)	Dokumen koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/ Project</i> (STAR SDP)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	b. Koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	Dokumen koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	c. Koordinasi pengembangan <i>good governance</i> melalui sosialisasi dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	Dokumen sosialisasi <i>good governance</i> dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	d. Koordinasi program RAN PK di tingkat pusat dan daerah.	Dokumen Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan RAN PK di pusat dan daerah.	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	e. Koordinasi penyusunan Jakarta	Dokumen koordinasi penyusunan	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Tabel 27
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
	<i>Commitment</i> dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	Jakarta <i>Commitment</i> dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.			
	f. Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	Dokumen koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	g. Koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	Dokumen koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	h. Koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	Dokumen koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	i. Koordinasi penyusunan buku pegangan (<i>handbook</i>) Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2009	Dokumen koordinasi penyusunan buku pegangan (<i>handbook</i>) Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2009	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	j. Koordinasi penataan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	Dokumen koordinasi penataan ruang	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	k. Koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam	Dokumen koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	l. Koordinasi kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dokumen kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	m. Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Berikut ini penjelasan lebih rinci tentang pencapaian pengukuran kinerja kegiatan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2009 sebagaimana tertulis dalam tabel di atas:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) berupa konsep rancangan RPJMN 2010-2014 dan rancangan RKP 2010. Kedua kegiatan penyusunan rencana pembangunan nasional tersebut telah berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2009 yaitu sebanyak 2 dokumen. Untuk rancangan RKP tahun 2010 telah ditetapkan menjadi RKP Tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009, sedangkan untuk rancangan RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2009 tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan Rancangan RPJP 2005-2025 dan Rancangan RKP Tahun 2008. Kemudian, kedua rancangan tersebut disetujui oleh Pemerintah (Presiden) dan DPR, menjadi RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 2007, dan RKP Tahun 2008 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007. Pada tahun 2008 menghasilkan Rancangan RKP Tahun 2009 yang merupakan pejabaran tahun ke lima dari RPJM periode 2005-2009. Sedangkan penyusunan rancangan RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran periode ke-2 dari RPJPN periode 2005-2025. Rancangan RPJMN 2010-2014 tersebut menjadi acuan K/L dalam menyusun Renstra 2010-2014 sebelum ada penetapan RPJMN 2010-2014 pada bulan Januari 2010.

Dalam mencapai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan tersebut di atas, dijumpai beberapa hambatan, antara lain: 1) adanya perbedaan pandangan antar instansi pemerintah mengenai perencanaan dan penganggaran sehingga menyulitkan penyusunan rencana-rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat disepakati bersama; 2) sumber pendanaan APBN yang belum memadai untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM 2005-2009 dan RKP (tahunan).

Untuk menyelesaikan masalah atau hambatan di atas, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: 1) meningkatkan kuantitas (dalam batas tertentu) dan kualitas pertemuan dengan para *stakeholders* (semua K/L atau mitra kerja Kementerian PPN/Bappenas); dan 2) semua kedeputan dan direktorat perencana di Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan K/L yang menjadi mitra kerjanya melakukan optimalisasi anggaran untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan dalam RKP 2009 dan juga target masing-masing K/L.

2. Pengkajian Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan utama untuk penyusunan Rancangan RPJM 2010-2014 dan Kajian Strategis Lainnya

Pada tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas melakukan berbagai kajian/telaah strategis sebagai dukungan atau bahan utama untuk pengambilan kebijakan pembangunan termasuk untuk penyusunan dokumen perencanaan (RKP dan RPJMN 2010-2014). Jumlah kajian yang dihasilkan pada tahun 2009 adalah sebanyak 59 kajian, terdiri dari kajian isu strategis (sektor, bidang, daerah) dan 3 kajian prakarsa strategis yang bersifat lintas sektor/bidang dan atau lintas daerah/wilayah. Semua kajian tersebut, telah dievaluasi secara ketat baik dari sisi

kualitas *output* maupun sisi prosesnya (ketaatan pada peraturan dan konsistensi dengan TOR-nya) serta berdasarkan hasil revidi Inspektorat Kementerian PPN/ Bappenas, untuk diterbitkan dalam majalah Info Kajian Kementerian PPN/Bappenas Edisi 1 dan 2 tahun 2010, seperti yang dilakukan terhadap semua kajian tahun 2008 dan hasilnya diterbitkan Info Kajian Edisi 1 dan 2 tahun 2009 yang telah disampaikan kepada seluruh Setjen/Setama//Biro Perencanaan pada Kementerian/Lembaga, Bappeda Propinsi/Kabupaten/Kota, beberapa perguruan tinggi dan anggota DPR mitra kerja. Penyampaian Info Kajian yang mendapat respon positif dari *stakeholders* tersebut dimaksudkan untuk membangun dan membina hubungan kerja dan *sharing ideas* di bidang perencanaan pembangunan.

Dari 59 kajian tersebut terdapat 10 *background studies* yang digunakan sebagai bahan atau masukan utama penyusunan Rancangan RPJMN 2010-2014. Sementara itu, *background studies* lainnya sudah dilaksanakan pada tahun 2008. Substansi *background studies* mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi makro, transportasi, investasi, usaha kecil-menengah dan koperasi di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan daerah/wilayah, perkotaan dan perdesaan. Tanpa *background studies* maka penyusunan Rancangan RPJMN 2010-2014 tidak dapat dilakukan dengan baik terutama dari sisi substansinya. Dengan demikian, *background studies* merupakan hal yang harus dilakukan, seperti yang juga dilakukan ketika menyusun RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2004-2009 beberapa tahun yang lalu.

Kajian-kajian strategis yang dilaksanakan pada tahun 2009 adalah kajian yang dilakukan oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan nasional, yaitu penyusunan RKP 2010 dan RPJMN 2010-2014, dan sebagian kecil oleh unit-unit kerja pendukung. Berikut ini, bidang kajian yang dilakukan di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2009 yang dikelompokkan sesuai nama-nama kedeputian dan staf ahli:

- **Bidang sumber daya manusia dan kebudayaan** meliputi kajian perencanaan kesehatan, gizi, obat dan makanan; relevansi pendidikan menengah kejuruan terhadap kebutuhan pasar kerja; pengelolaan dana sosial keagamaan; analisa pembangunan kependudukan, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; strategi pengembangan SDM di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- **Bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan** meliputi kajian kerangka kebijakan politik luar negeri dan kerjasama internasional; optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi dalam pelayanan publik; efektifitas bantuan luar negeri bidang

hukum dan HAM; diagnostik analisis peraturan daerah; *backgorund study* RPJMN 2010-2014 bidang hankam.

- **Bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah** meliputi kajian penyusunan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan 2010-2014; pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka penyusunan RPJMN 2010-2014; penyusunan dan sosialisasi rencana tindak pemberdayaan koperasi UMKM dalam rangka penyiapan RPJMN 2010-2014; penyiapan RPJMN 2010-2014 bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
- **Bidang ekonomi** meliputi kajian analisa gejolak ekonomi internasional terhadap ekonomi Indonesia; pengembangan model keuangan negara untuk penetapan ruang fiskal; pengembangan kebijakan pembiayaan syariah; posisi daya saing perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional; penyusunan rancangan awal RPJM 2010-2014 sektor industri, iptek dan BUMN.
- **Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup** meliputi kajian penyusunan strategi, perlindungan dan dukungan kepada petani; perhitungan nilai ekonomi terhadap hutan dan lahan eks rehabilitasi; peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan; efisiensi distribusi BBM; dan dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor pembangunan.
- **Bidang sarana dan prasarana** meliputi kajian pengelolaan SDA terpadu Jakarta dan sekitarnya; *road map* pembangunan sumber daya air; rencana pembangunan transportasi nasional jangka menengah 2010-2014; kerangka kelembagaan dan investasi pembangunan permukiman dan perumahan; pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) untuk peningkatan pasokan listrik nasional; dampak regulasi KPS terhadap pelaksanaan KPS.
- **Bidang pengembangan regional dan otonomi daerah** meliputi kajian *updating* model keterkaitan regional; strategis penyusunan indikator pembangunan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan: revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka perumusan RPJMN 2010-2014; strategi pembangunan perkotaan; *background study* pengembangan pusat-pusat ekonomi lokal dan regional yang berkelanjutan; arah kebijakan dan indikator kinerja bidang tata ruang dan pertahanan.
- **Bidang pendanaan pembangunan** meliputi kajian strategi perencanaan pembangunan; alokasi pendanaan pembangunan jangka menengah; analisis proyek pendanaan luar negeri

bilateral Pemerintah Indonesia untuk proyeksi jangka menengah (2009-2014); pengembangan pendanaan luar negeri multilateral; dampak pemantauan pendayagunaan pendanaan pembangunan terhadap kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri.

- **Bidang evaluasi kinerja pembangunan** meliputi kajian penetapan dana perimbangan, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan; evaluasi kebijakan pembangunan jangka menengah RPJMN 2004-2009 dalam pembangunan kesehatan; penyempurnaan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- **Staf Ahli Menteri PPN** meliputi kajian peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana tahun 2009; pengarusutamaan penanganan bencana pada kebijakan pembangunan pemerintah daerah; kompetensi SDM aparatur dalam mendukung kinerja instansi pemerintah; pembangunan perdesaan dan pertanian berbasis ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri; evaluasi penanggulangan kemiskinan di perkotaan; evaluasi program pengembangan kecamatan; analisis kebijakan pengembangan energi arus laut Kepulauan Riau; analisis kebijakan pengembangan energy arus laut Nusa Tenggara; dan analisis strategis pengembangan industry maritime nasional.

Adapun permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kajian-kajian pada tahun 2009, antara lain: 1) sangat padatnya kegiatan di setiap unit kerja dalam melaksanakan tupoksinya, selain melakukan kajian juga pada waktu yang bersamaan harus menyusun Rancangan RKP 2010 dan Rancanagan RPJMN 2010-2014 , melakukan pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan unit kerja internal (antar sektor/bidang) dan eksternal dengan K/L lain; 2) proses revisi atau proses pencairan dana yang masih tetap memerlukan waktu yang cukup lama menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan kajian menjadi terbatas. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain: 1) mengoptimisasi SDM Bappenas dengan jadwal waktu yang sangat ketat dalam pelaksanaan tugas baik tugas menyusun rencana pembangunan dan pengkajian kebijakan sehingga tidak jarang harus bekerja hingga malam hari dan pada hari-hari libur; dan 2) melibatkan nara sumber atau tenaga ahli yang kompeten.

3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pendanaannya

Kegiatan penyusunan rencana pendanaan nasional menghasilkan Penetapan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga, melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara

PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah maupun tahunan diperlukan koordinasi dengan seluruh *stakeholders* pembangunan. Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas *participative planning*. Pada awal tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai koordinasi dengan seluruh pelaku pembangunan. Salah satunya adalah pertemuan antara Menteri Negara PPN/Bappenas dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan proyeksi angka makro dalam pencapaian pembangunan nasional untuk RKP 2010 dan prediksi atas situasi keuangan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selanjutnya Menteri Negara PPN/Bappenas menentukan besaran *resources envelope* sebagai acuan dalam menentukan perkiraan besaran alokasi anggaran (pagu indikatif) bagi semua Kementerian/ Lembaga (K/L). Pagu indikatif tersebut ditetapkan melalui surat edaran bersama (SEB) antara Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dan disampaikan kepada seluruh Kementerian/ Lembaga dalam pada Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorpus). Kemudian, Pagu Indikatif tersebut menjadi acuan bagi K/L untuk menyusun rencana kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Koordinasi strategis berikutnya adalah Musyawarah Pembangunan baik tingkat propinsi (Musrenbangprop) maupun nasional (Musrenbangnas). Musrenbang adalah suatu media pembahasan dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sejak Januari hingga April/Mei, secara berjenjang mulai tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Hasil Musrenbang kabupaten/kota tersebut menjadi bahan usulan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) kabupaten/kota dalam pembahasan di Musrenbangprop. Kemudian hasil Musrenbangprop menjadi usulan rencana pembangunan daerah masing-masing propinsi untuk dibahas dalam Musrenbangnas.

Musrenbangnas tahun 2009 dilaksanakan pada bulan Mei 2009. Peserta Musrenbangnas adalah seluruh kepala daerah, Kepala Bappeda propinsi/kabupaten/kota. Musrenbang dibuka oleh Presiden, diisi arahan Presiden dan Wakil Presiden, serta diskusi dengan beberapa Menteri terkait, agar terdapat pandangan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

di pusat dan daerah. Pada bulan Desember 2009 juga dilaksanakan Musrenbangnas untuk menyusun Rancangan RPJMN 2010-2014 dengan peserta seluruh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), Kepala Bappeda propinsi/kabupaten/kota. Musrenbangnas RPJMN ini juga dibuka oleh Presiden, diisi arahan Presiden dan Wakil Presiden, serta diskusi dengan beberapa Menteri terkait dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMN 2010-2014.

Seluruh kegiatan Musrenbangnas, koordinasi dalam Musrenbangprop dimana Kementerian PPN/Bappenas terlibat (hadir), dan Rakorpus di Jakarta telah berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2009. Kegiatan Rakorpus dan Musrenbangnas adalah kegiatan rutin yang strategis yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas untuk menghasilkan Rancangan RKP tahunan yang akan ditetapkan Presiden setelah mendiskusikan anggarannya (APBN) dengan DPR. Semua kegiatan koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mensinkronisasikan seluruh program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pada tahun 2009, pelaksanaan dan hasil Rakorpus dan Musrenbangnas lebih baik dibandingkan dengan tahun 2008. Hal ini disebabkan adanya persiapan yang lebih baik, dari sisi kelengkapan dan penyempurnaan materi atau substansi yang akan dibahas serta mekanisme pembahasannya. Hasil Musrenbangnas dituangkan dalam kesepakatan bersama pada akhir Musrenbangnas. Kesepakatan tersebut menjadi acuan K/L dan Pemda untuk menindaklanjutinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Rakorpus dan Musrenbang tahun 2009 terdapat beberapa hambatan, yaitu: 1) masih relatif lemahnya komitmen atas tindak lanjut kesepakatan yang dihasilkan dalam Musrenbangnas untuk dijadikan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah; 2) belum terpenuhinya sebagian usulan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan baik untuk kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah, terutama disebabkan keterbatasan anggaran.

Langkah antisipatif yang dilakukan adalah 1) mendorong hasil kesepakatan tersebut untuk dapat dipatuhi melalui pertemuan bilateral bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah; 2) menentukan kegiatan-kegiatan yang prioritas agar sesuai dengan sumber pendanaan yang tersedia; 3) mempersiapkan sejak awal dan matang substansi yang akan dibahas dalam Musrenbangnas.

4. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional

Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2009 adalah evaluasi 4 (empat) tahun pelaksanaan RPJM periode 2005-2009 dan RKP 2008. Evaluasi merupakan kegiatan yang strategis untuk melihat kinerja atau keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan rencana pembangunan tahun atau periode berikutnya.

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari laporan evaluasi pembangunan daerah kabupaten/kota yang disampaikan oleh Walikota/Bupati kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya Gubernur menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. Demikian juga Kementerian/Lembaga juga menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. Kemudian, Kementerian PPN/Bappenas mengolah hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Seluruh proses pelaksanaan evaluasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional. *Output* kegiatan evaluasi tersebut adalah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan RKP 2008.

Kegiatan evaluasi tersebut di atas telah berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2009. Dibandingkan dengan tahun 2008, dari sisi substansi, kegiatan evaluasi tersebut di atas jauh lebih baik, lebih fokus dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan telah dibentuknya Kedeputusan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada akhir tahun 2007. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dirasakan masih terdapat hambatan, yaitu: 1) terdapat beberapa instansi atau daerah yang terlambat menyampaikan laporan hasil evaluasinya, atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas; 2) belum optimalnya sosialisasi mengenai sistem aplikasi pelaporan sesuai dengan PP 39 Tahun 2006, sehingga banyak instansi yang kesulitan dalam menyusun laporan sesuai dengan aplikasi program yang telah ditetapkan; dan 3) laporan dibuat hanya untuk memenuhi tuntutan aturan, karena laporan yang disampaikan tidak ada konsekuensinya. Sedangkan upaya penyelesaiannya adalah dengan melakukan: 1) teguran melalui surat kepada pimpinan kementerian/lembaga dan pemda (SKPD terkait); 2) sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan evaluasi kinerja di beberapa kementerian/lembaga dan pemda; dan 3)

penyempurnaan aplikasi pelaporan PP No. 39 Tahun 2006, serta system dan mekanisme evaluasi pelaporan.

5. Koordinasi strategis lainnya yang bersifat sektoral/bidang dan daerah serta lintas sektoral/bidang dan lintas wilayah

Terdapat beberapa kegiatan yang bersifat koordinasi strategis yang merupakan penugasan langsung Presiden kepada Kementerian PPN/Bappenas, antara lain sebagai berikut:

5.a. Reformasi Audit Nasional-Program/Proyek Pembangunan Sektoral (*State Audit Reform Sectoral Development Project; STAR-SDP*)

STAR-SDP merupakan salah satu program reformasi birokrasi di bidang audit sektor publik untuk turut mendorong terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik termasuk pencegahan korupsi. STAR-SDP didisain pada akhir tahun 2004 dan dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga 2009 yang kemudian dilanjutkan hingga 2010. Proyek ini melibatkan instansi pemerintah dan secretariat lembaga tinggi negara yaitu Kementerian Keuangan (Itjen Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), Kementerian PPN/Bappenas (Kedeputian Polhukhankam, Direktorat Aparatur Negara); Itjen Kementerian Dalam Negeri yang juga membina Bawasda Propinsi dan Kabupaten/Kota; Itjen Kementerian Pendidikan Nasional, BPKP, BPK dan Sekretariat DPR. Dalam proyek ini, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan menjadi koordinator proyek (*Project Investment Loan Manajemen Unit, ILMU*) untuk membangun diklat gelar dan non gelar di bidang akuntansi pemerintahan; pengembangan substansi audit kinerja (*performance audit*) disamping audit keuangan (*financial audit*), dan kegiatan lainnya yang strategis di instansi dan lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan mendapat tugas sebagai koordinator untuk Program Loan Management Unit (PLMU) yang tugas utamanya adalah menghasilkan peraturan tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Tugas ILMU dan PLMU saling menunjang, antara lain ditunjukkan dengan keterlibatan dan kontribusi Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan R-PP SPIP yang telah ditetapkan menjadi PP No. 60 Tahun 2008 mengenai SPIP.

Sebagai koordinator-ILMU, Bappenas harus mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan STAR-SDP yang tertuang dalam *Project Management*

Administration (PAM) yang kemudian berubah menjadi *Work Plan*. Beberapa kegiatan ILMU Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi/lembaga dikoordinasikannya, yang secara signifikan berpengaruh besar khususnya terhadap peningkatan kapasitas lembaga dan kompetensi auditor atau para pegawai yang lainnya yang ditugaskan mendalami akuntansi pemerintahan, adalah sebagai berikut: 1) pembentukan program S1-S2 untuk studi akuntansi pemerintahan (pertama kali di Indonesia, sebelumnya hanya akuntansi umum) di 36 perguruan tinggi negeri dan swasta yang dinilai layak sesuai kriteria Dirjen Dikti-Kementerian Diknas, yang dilanjutkan dengan pemberian beasiswa STAR-SDP (sumber *loan* dan *grant*) kepada 664 auditor (S1=30, S2= 634; Bawasda 334 orang dan 300 dari Itjen K/L); dan dari APBD Pemprop Gorontalo, Sulsel dan DKI sebanyak 34 dan anggaran Kementerian Diknas sebanyak 302 orang, serta biaya pribadi sebanyak 4 orang; 2) penyusunan lebih dari 16 modul diklat akuntansi dan audit, yang menjadi acuan BPPK atau lembaga lainnya di daerah untuk melaksanakannya; 3) diklat dengan menggunakan 16 modul tersebut di 25 PTN/PTS yang sudah memiliki program studi akuntansi pemerintahan untuk sebanyak 2400 pegawai (auditor dan non auditor) hingga tahun 2010; 4) mengembangkan dan mencantumkan materi audit kinerja (*performance audit*) dalam diklat dan program S1-S2 di atas; 5) mendukung secara intensif pemberdayaan auditor dan lembaga BPK serta SDM di Sekretariat DPR untuk menyiapkan dan membaca laporan hasil audit BPK untuk bahan anggota DPR.

Keterlibatan Pemda dan perseorangan dalam program S1 dan S2 di atas menunjukkan keberhasilan program STAR-SDP dalam pengembangan program S1 dan S2 akuntansi pemerintahan yang dikoordinasikan ILMU Kementerian PPN/Bappenas. Demikian juga, jumlah peserta diklat, juga menunjukkan peningkatan dibandingkan target, serta meningkatnya kesadaran mengenai perlunya peningkatan kompetensi pegawai di bidang akuntansi pemerintahan. Sumber anggaran beasiswa diklat gelar dan non gelar dari STAR SDP sebagian besar diperoleh dari hibah Pemerintah Belanda dan ADB.

Walaupun STAR-SDP ILMU Kementerian PPN/Bappenas berhasil mencapai target bahkan melampaui yang direncanakan (antara lain: penambahan hibah dari Pemerintah Belanda untuk beasiswa karena dinilai berhasil, dan juga beberapa Pemda dan K/L menganggarkannya dari APBD/anggarannya sendiri), namun semuanya itu dicapai dengan relatif sulit karena beberapa hambatan. Hambatan yang dialami terutama mengenai koordinasi antara K/L termasuk

BPK dan Sekretariat DPR pada 2 tahun pertama (tahun 2005-2006) pelaksanaan STAR-SDP, disebabkan beberapa perbedaan pandangan dan kondisi internal masing-masing lembaga. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan bahkan menjadi tim yang saling mendukung, melalui pertemuan koordinasi secara intensif berdasarkan kesejajaran dalam kepentingan yang sama yaitu menuju audit untuk membangun *good governance*, sesuai moto STAR-SDP ILMU Kementerian PPN/Bappenas: *audit for good governance*. Keberhasilan pelaksanaan STAR-SDP tersebut dapat dirasakan dari tahun ke tahun, dan diharapkan pada tahun 2010 keberhasilan tersebut akan meningkat dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam *Loan Agreement STAR-SDP* yang ditandatangani pada akhir Desember 2004.

5.b. Koordinasi Pelaksanaan Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, yang memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang, termasuk kebijakan bidang infrastruktur. Terkait dengan kebijakan infrastruktur, Inpres tersebut menyebutkan bahwa kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) atau *public private partnership* (PPP), kebijakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui percepatan penyediaan tanah dan pembiayaan serta penegasan kebijakan pemerintah dalam kewajiban layanan publik. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mendapat tugas mempersiapkan kelembagaan dan kebijakan KPS tersebut.

Sesuai arahan dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menerbitkan *Public Private Partnership Book* (PPP Book). PPP Book edisi perdana ini diluncurkan pada tanggal 25 Maret 2009. PPP Book adalah daftar proyek infrastruktur pemerintah yang ditawarkan kepada pihak swasta, diterbitkan sebagai media informasi kepada para pemangku kepentingan sebagai komitmen pemerintah terhadap transparansi penyiapan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Proyek pembangunan infrastruktur yang terdapat dalam PPP Book terbagi atas tiga kategori yaitu Proyek Potensial (*Potential Project*), Proyek Prioritas (*Priority Project*) dan Proyek Siap untuk Ditawarkan (*Project Ready for Offer*).

Total proyek dalam *PPP Book* adalah 87 proyek dengan total nilai investasi sebesar US \$ 34,139,500,000 atau senilai lebih dari Rp. 341 trilyun dalam kurs USD 1= Rp. 10.000.

Dalam kerangka memfasilitasi pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) bidang infrastruktur dan memonitor proyek-proyek KPS tersebut serta mendukung peranan KKPPI, maka pada saat bersamaan dengan peluncuran *PPP Book*, Bappenas telah melakukan fungsionalisasi Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas sebagai Pusat KPS (*PPP Central Unit/ P3CU*). Fungsionalisasi Pusat KPS ini berdasarkan studi pada akhir tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat KPS. Hasil akhir dari studi ini adalah rekomendasi struktur organisasi dan fungsi yang sesuai untuk Pusat KPS di Indonesia, termasuk di dalamnya merekomendasikan supaya Pusat KPS berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas untuk memudahkan koordinasi perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan sektoral dan perencanaan pembiayaan pembangunan melalui PHLN dan APBN.

Sementara itu, pada tahun 2009 proyek infrastruktur yang mendapat perhatian utama KKPPI adalah *Proyek Central Java Coal Fired Steam Power Plant* (PLTU Jawa Tengah) dan Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Status terakhir persiapan pembangunan jembatan adalah terbitnya Keppres No.36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda, dimana Bappenas menjadi anggotanya. Sementara itu, proses pembangunan PLTU Jawa Tengah mendapatkan kendala terkait dengan isu *contracting agency* (instansi pemberi kontrak) yang masih mengalami perdebatan sesuai dengan definisi yang diatur dalam Perpres No. 67 Tahun 2005. Sampai akhir tahun 2009 status perkembangan PLTU Jawa Tengah masih menunggu hasil akhir Revisi Perpres No. 67 Tahun 2005.

Pada awal Kabinet Indonesia Bersatu II, terkait dengan program 100 hari Presiden SBY-Boediono, Kementerian PPN/Bappenas diberi tugas untuk merevisi Perpres No. 67 Tahun 2005, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya dengan tujuan dapat revisi perpres ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur. Pada bulan Agustus 2009, Revisi Perpres No. 67 Tahun 2005 telah disampaikan kepada Presiden. Namun karena adanya masukan terkait dengan perubahan UU Ketenagalistrikan di bulan September 2009 dan masukan pada pertemuan *National Summit* di akhir Oktober 2009, maka revisi perpres tersebut harus disesuaikan dan Sekretariat KKPPI telah melakukan pertemuan secara kontinyu dengan

kementerian teknis terkait serta para pemangku kepentingan untuk membahas perubahan Revisi Perpres No. 67 Tahun 2005. Hasil akhir (draft final) dari pembahasan perubahan Revisi Perpres No. 67 Tahun 2005 disampaikan kepada Presiden pada tanggal 12 Januari 2010.

5.c. Koordinasi Pengembangan *Good Governance* melalui sosialisasi dan pengembangan *Good Governance Index* (GGI)

Koordinasi *Good Governance* pada tahun 2009 lebih ditekankan pada pengembangan konsep *Good Governance Index* (GGI) yang penyusunan awalnya dilakukan pada semester kedua tahun 2007. GGI ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemda dan juga K/L dalam mengukur tingkat penerapan *good governance* di pemda dan K/L. Sampai dengan tahun 2008, GGI dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan LGSP (*Local Government Support Programm*) USAID, dan juga secara terbatas dengan Depdagri. Sedangkan pada tahun 2009, pengembangan GGI dilakukan hanya oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang sosialisasinya dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Konsep GGI yang dikembangkan difokuskan kepada penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, sebagai tindak lanjut studi Bappenas tahun 2006 di 174 kabupaten/kota, 24 propinsi dan 14 K/L yang menemukan kelemahan bahwa instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen masih belum sempurna atau masih kurang, belum secara konsisten dan berkelanjutan. Konsep GGI yang dikembangkan mendasarkan pada 4 (empat) prinsip *Good Governance* yaitu: transparansi, akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum. Setelah diujicobakan (*pre-test*) pada tahun 2008 di beberapa Pemda, antara lain Kabupaten Klaten, Sidenreng Rappang (Sulsel), Kabupaten Bekasi dan Binjai, masih diperlukan berbagai penyempurnaan mengingat konsep GGI yang dikembangkan oleh beberapa lembaga mitra selama ini, masih umum dan cenderung menggunakan ukuran-ukuran indeks pembangunan sektor seperti kesehatan, pendidikan. Dengan demikian GGI yang telah dikembangkan Bappenas sejak perengahan tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di instansi pemerintah yang difokuskan pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan.

Pada tahun 2009 telah dilakukan pemutakhiran perangkat alat ukur *Good Governance Index*. Beberapa hal yang dikembangkan, yaitu melakukan uji reliabilitas dan validitas kuesioner,

melakukan penambahan dan pengurangan pertanyaan. Materi pengembangan perangkat alat ukur GGI tersebut dilakukan untuk mengakomodasi usulan-usulan perbaikan yang diperoleh tim pada saat melakukan serangkaian kegiatan penyusunan dan *pre-test Good Governance Index* pada tahun 2008. Perangkat alat ukur *Good Governance Index* yang telah dimutakhirkan ini telah diujicobakan di beberapa Bappeda Kabupaten/Kota, yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Keerom.

Rencananya pada akhir tahun 2009, *Good Governance Index* dapat diluncurkan dan menjadi salah satu referensi dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di berbagai instansi pemerintah. Namun mengingat pelaksanaan ujicoba, khususnya untuk daerah Jawa Tengah baru dapat dilaksanakan pada Desember 2009, maka rencana peluncuran *Good Governance Index* belum dapat dilaksanakan.

Namun demikian, dari hasil pemutakhiran dan ujicoba di beberapa daerah tersebut, perangkat ukur *Good Governance Index* telah siap untuk disebarluaskan kepada instansi-instansi terkait sebagai salah satu referensi dalam penerapan tata pemerintahan yang baik. Mengingat fokus *Good Governance Index* adalah pada penerapan fungsi-fungsi manajemen, maka hal ini akan sangat relevan dan sejalan dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja.

Selain itu pada tahun 2009 *Good Governance* Bappenas juga melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak antara lain dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian PAN, Bank Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan *Good Governance* (KNKG) yang ditujukan untuk upaya penerapan *Good Governance* di berbagai instansi maupun untuk mengembangkan *good governance* di masa depan. Beberapa upaya sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2009 antara lain adalah melalui penyebaran materi dan publikasi *Good Governance* yang dimiliki Bappenas ke berbagai instansi pemerintah seperti Pemda (Setda) dan Kementerian/Lembaga (Setjen/Sekut) dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

5.d. Koordinasi Program RAN-PK di Tingkat Pusat dan Daerah, serta *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Pelaksanaan koordinasi Program Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dilakukan Kementerian PPN/Bappenas sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas telah bekerja sama dengan instansi pusat (antara lain BKPM, BPN, Ditjen Pajak dan Samsat) dan daerah dalam mendorong setiap instansi untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan kegiatan koordinasi RAN-PK, Kementerian PPN/Bappenas turut berperan aktif bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri dan KPK dalam mengadopsi UNCAC di Indonesia. Komitmen pelaksanaan UNCAC ini merupakan salah satu pendorong untuk penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia, dimana salah satu kegiatan strategisnya adalah pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2009 telah disusun Naskah Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010-2025 dan Rencana Aksinya (Stranas PK dan Rencana Aksi). Proses penyusunan dokumen Stranas PK dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun mulai akhir tahun 2006 melalui proses partisipatif yang melibatkan Tim Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) yang dibentuk melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagaimana terakhir diubah melalui No. KEP.24/M.PPN/HK/01/2009 tanggal 9 Januari 2009. Tim ini terdiri dari kementerian/lembaga yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, didukung oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi yang bekerjasama dalam 6 (enam) kelompok kerja (*Working Group*). Stranas PK dan Rencana Aksi memuat 6 (enam) fokus upaya pemberantasan korupsi yang juga merupakan fokus pelaksanaan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC), yaitu fokus strategi pencegahan, strategi penindakan, strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan, strategi penyelamatan aset hasil korupsi, strategi kerjasama internasional dan strategi koordinasi pelaporan upaya pemberantasan korupsi.

Stranas PK dan Rencana Aksi nantinya diharapkan akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengimplementasian Stranas PK dan Rencana Aksi akan terintegrasi dalam RPJMN, RPJMD, RKA-KL, RKA-SKPD untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) dan menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*) menjadi tolok ukur komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam mengkoordinasikan Program RAN-PK adalah masih ada instansi pemerintah yang enggan untuk menyusun dan menerapkan RAN-PK di

lingkungannya. Namun demikian, hal ini akan terus diupayakan penyelesaiannya melalui sosialisasi dan diskusi secara intensif dengan pimpinan masing-masing instansi.

5.e. Koordinasi Penyusunan Jakarta Commitment dengan Mitra (Bilateral dan Multilateral) untuk Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan PHLN.

Pada tahun 2008, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Keuangan melakukan terobosan dalam pengelolaan PHLN yaitu dengan mengajak para mitra pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) baik bilateral (Jepang, USA, Inggris, Korea, Spanyol, Perancis, Belanda, Kanada, dsb) maupun multilateral (ADB, UNDP, WB, dan sebagainya) untuk menyepakati *Jakarta Commitment* yang akan memberikan ruang bagi Pemerintah Indonesia untuk mendisain dan menentukan sendiri peruntukan dan pengelolaan PHLN yang diterimanya (*Government of Indonesia driven* atau *GOI driven*).

Pada tanggal 12 Januari 2009 Pemerintah Indonesia berhasil menarik para mitra PHLN untuk menandatangani *Jakarta Commitment*. Dokumen ini berisi kesepakatan bersama untuk melaksanakan upaya masing-masing pihak dan atau upaya secara bersama untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan PHLN menuju tercapainya efektifitas pembangunan nasional. Dokumen *Jakarta Commitment* ditandatangani oleh 26 mitra kerja sama pembangunan multilateral dan bilateral. Langkah ini sesuai dengan kesepakatan internasional, pada Deklarasi Paris (2005) tentang evektivitas bantuan, *Accra Agenda for action (2008)* dan *Doha conference : Review on Financing for Development (2008)*

Aspek terpenting dari *Jakarta Commitment* adalah *ownership*. Pemerintah meminta agar kebijakan bantuan mitra pembangunan di Indonesia harus sejalan dengan kepentingan dan prioritas nasional serta pengembangan dan pelaksanaannya dipimpin oleh Indonesia (*Indonesian led Program*). Selanjutnya, mitra pembangunan dalam melaksanakan kerjasama pembangunan secara bertahap akan menggunakan atau menyesuaikan dengan sistem nasional, misalnya dalam hal penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Mitra pembangunan juga akan mengharmonisasikan program dan kegiatannya, untuk mengurangi duplikasi dan mencapai sinergi. Sesuai deklarasi Paris, mitra pembangunan secara terprogram akan mengurangi program atau kegiatan dukungannya yang bersifat mengikat (*tied aid*). Aspek penting lainnya, Indonesia dapat memperkuat sistem dan kapasitas nasional untuk menangkap peluang alternatif pendanaan

yang lebih besar dan dinamis di tingkat global seperti *Public Private Partnership*, *Carbon Market*, dan sebagainya.

Guna mendukung implementasi *Jakarta Commitment*, dibentuk Sekretariat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Mendukung Keefektifan Pembangunan (A4DES) yang dikelola oleh *Steering Committee* yang dipimpin oleh Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas guna melaksanakan agenda dan rencana tindak *Aid for Development Effectiveness* serta melakukan monitoring, evaluasi dan revisi rencana tindak tersebut. Hasil yang dicapai dalam fase pertama (2009-2010) dari kerangka kerja A4DES adalah telah beroperasinya Sekretariat A4DES, dibentuknya A4DES Trust Funds, serta memfokuskan pada pemenuhan target Deklarasi Paris. Capaian yang diraih dari fase pertama tersebut akan menjadi pijakan untuk melanjutkan kerangka kerja fase kedua (2010-2014) A4DES.

5.f. Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Manusia (PNPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program terobosan bagi Kabinet Indonesia Bersatu. Terlepas dari berbagai kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, pada tahun 2009 PNPM Mandiri telah mencakup seluruh 6.408 kecamatan di Indonesia. Terkait dengan hal ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan aktif dalam perencanaan dan pengembangan program bersama kementerian/lembaga terkait lainnya dalam pengembangan kebijakan PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri merupakan kebijakan payung program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dikategorikan atas PNPM-Inti dan PNPM-Penguatan. PNPM-Inti saat ini program PNPM terdiri dari 5 program, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Sedangkan program-program PNPM-Penguatan terdiri atas program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sektor seperti Departemen Pertanian (PUAP), Departemen Kelautan Perikanan (PNPM-KP), dan Departemen Pariwisata (PNPM-Pariwisata). Dalam implementasinya program-program ini menggunakan konsep dan pendekatan yang mengacu pada PNPM Mandiri.

Pada tahun 2009, PNPM Mandiri dilaksanakan di 47.954 desa/kelurahan di 6.408 kecamatan dengan anggaran untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 9,48 triliun, yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 6.35 triliun, PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 1.85 triliun, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan dan RIS PNPM sebesar Rp 810 milyar, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus sebesar Rp 119 milyar dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah sebesar Rp. 355 miliar. Total dana BLM yang telah terserap sampai 30 Desember 2009 mencapai Rp 6.90 triliun (92%). Dana BLM yang belum terserap hingga akhir Desember 2009 akan dilanjutkan pelaksanaannya hingga April 2010 sesuai ketentuan dalam UU APBN 2010.

Adapun kendala atau hambatan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi PNPM, adalah sebagai berikut:

- a) Perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah tidak semuanya berjalan baik

Dukungan daerah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri tidak semuanya berjalan mulus, meskipun arahan dan sosialisasi telah dilakukan. Alasan yang sering dikemukakan, meskipun tidak dalam bentuk tertulis, beberapa Bupati dan Walikota serta sebagian kalangan di DPRD mencurigai program PNPM Mandiri ini adalah program kampanye terselubung pemerintahan sekarang dalam rangka pemilu 2009. Namun demikian ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi dengan menyediakan DDUPB dan jauh melebihi ketentuan, antara lain: Kota Palopo, Kabupaten Maros, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten. Paser.

- b) Harmonisasi Dalam Pengadaan dan Pengembangan Fasilitator

Penambahan cakupan kecamatan yang cukup ekspansif menyebabkan K/L pelaksana kesulitan dalam memenuhi kebutuhan fasilitator. Adanya perbedaan kualifikasi, struktur gaji, dan insentif antar program, baik program PNPM maupun program pembangunan lainnya menyebabkan “turn over” fasilitator cukup tinggi. Untuk itu diperlukan rencana terpadu pengadaan fasilitator antar program PNPM. Untuk mempertahankan fasilitator yang ada (mengingat banyak fasilitator pindah ke program lain atau menjadi caleg), juga dapat diupayakan hal-hal seperti: standarisasi remunerasi dan insentif fasilitator, sertifikasi fasilitator agar ada “jenjang karir,” menjamin keberlangsungan pelaksanaan program di masyarakat, mengembangkan jaringan informasi antar fasilitator (web, sms, dsb). Remunerasi untuk FT dan fasilitator daerah terpencil perlu mendapat perhatian.

- c) Monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri dilakukan secara parsial

Mengingat besarnya cakupan jumlah kecamatan dan program dalam PNPM Mandiri, monitoring dan evaluasi terhadap PNPM sampai dengan tahun 2008 baru dilakukan secara parsial di masing-masing program. Oleh karena itu, keberhasilan PNPM secara terpadu sulit untuk diukur. Untuk itu, pada tahun 2009 telah dibangun sistem informasi manajemen terpadu (SIMPADU) PNPM Mandiri yang terintegrasi dengan MIS yang ada di masing-masing program PNPM Mandiri. SIMPADU PNPM Mandiri yang dibangun di Pusat Data Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang Bappenas) bertujuan untuk memantau pelaksanaan dan kinerja pelaksanaan program-program PNPM Mandiri berdasarkan kerangka monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri. Pada tahun 2010 SIMPADU PNPM Mandiri akan dikembangkan lebih lanjut baik kualitas maupun keterkaitannya dengan berbagai MIS yang ada di masing-masing sektor dan daerah. SPI akan dikembangkan secara terbuka untuk memudahkan berbagai pihak memanfaatkan data dan informasi terkait dalam rangka mempercepat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

5.g. Koordinasi Program Nasional Pengembangan Masyarakat - Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) diluncurkan (launching) Pemerintah RI pada tanggal 6 Agustus 2008. Program PISEW merupakan salah satu program inti dari program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri karena memiliki kriteria dan berorientasi pada konsep "*Community Driver Development (CDD)*" dan *labor Intensive Driven Development (LID)*. Dengan demikian Program PISEW dikenal dengan nama PNPM-PISEW. Prinsip pelaksanaannya adalah transparansi dan akuntabel, partisipatif, kolaboratif, demokratis, kesetaraan gender serta berkelanjutan.

PNPM-PISEW dilaksanakan atas dasar penyempurnaan dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah selesai dan penyesuaian terhadap berbagai perkembangan kebijakan nasional yang ada antara lain Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Perencanaan Pembangunan (UU No.25 Tahun 2005), maupun Penataan Ruang (UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.26 Tahun 2008). Pelaksanaan PNPM-

PISEW diharapkan juga dapat mendorong terjadinya penguatan kebijakan daerah, khususnya yang terkait dengan pencapaian 3 (tiga) tujuan utama, yaitu :

1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan cara membentuk dan membangun Kawasan Strategis Kabupaten (KSK);
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Institusi Lokal di tingkat desa, yang akan dilaksanakan melalui pelaksanaan desiminasi, sosialisasi lokakarya dan pelatihan di berbagai tingkat pemerintahan serta pelaksanaan musyawarah, forum-forum konsultasi dan pendampingan yang melibatkan masyarakat, dari tingkat desa sampai kecamatan;
3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan PNPM-PISEW.

Ketiga tujuan tersebut akan diupayakan melalui pendekatan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal dan pembangunan sarana prasarana sosial ekonomi dasar di perdesaan secara partisipatif. PNPM-PISEW dilaksanakan di 237 kecamatan, 34 kabupaten dari 9 provinsi di Indonesia yaitu: Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat.

Instansi Pelaksana PNPM - PISEW adalah:

1. Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Coordinating Agency* mempunyai peran aktif dalam pengembangan kebijakan terkait dengan PNPM- PISEW dan mendukung instansi pelaksana lainnya;
2. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU selaku *executing agency* sekaligus sebagai *Implementing agency* untuk kegiatan pembangunan infrastruktur;
3. Direktorat Jenderal PMD Depdagri selaku *Implementing agency* untuk kegiatan kampanye publik dan kredit mikro, dan;
4. Direktorat Jenderal Bina Bangda Depdagri selaku *implementing agency* melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan institusi lokal di perdesaan.

Kegiatan PNPM-PISEW terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Pengembangan infrastruktur skala kecil, yang terbagi atas 6 (enam) kategori sebagai berikut:
1) transportasi, 2) produksi pertanian, 3) pemasaran pertanian, 4) air bersih dan sanitasi lingkungan, 5) sarana pendidikan, dan 6) sarana kesehatan;

2. Kredit mikro/dana bergulir masyarakat (DBM) sebagai *Pilot Project* ;
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, fasilitator dan masyarakat di daerah yKeang menerima PNPM-PISEW.

5.h. Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Isu perubahan iklim (*climate change*) merupakan isu pembangunan (*development issues*) yang bersifat lintas bidang sektor dan lintas wilayah. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun rencana pembangunan nasional dikaitkan dengan isu perubahan iklim global. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu tersebut ke dalam sektor pembangunan. Langkah-langkah yang diambil dalam menangani perubahan iklim tersebut adalah mengkoordinasikan pengarusutamaan tersebut melalui serangkaian koordinasi, antara lain: (i) Membuat dokumen perencanaan/dokumen pengarusutamaan (*mainstreaming*) perubahan iklim yang disebut dengan “*The Yellow Book*” ; (ii) Mengkoordinasikan perencanaan pendanaan bilateral dan multilateral untuk perubahan iklim ; dan (iii) melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.

Hambatan yang dihadapi adalah masalah koordinasi dan pemahaman yang tidak selalu sama antar instansi yang terkait dalam mengantisipasi perubahan iklim tersebut. Namun, hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan berbagai pertemuan secara intensif dan mendalam baik dalam forum formal maupun informal.

5.i. Koordinasi Pengelolaan Bantuan Hibah (*grant*) Luar Negeri (multilateral dan bilateral) untuk Penyelenggaraan Pemilu 2009

Pada tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk mengkoordinasikan hibah (*grant*) dari para mitra pembangunan (donor bilateral dan multilateral) untuk membantu atau mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009, yang antara lain terkait dengan penguatan kelembagaan organisasi penyelenggara pemilu, sosialisasi dan pendidikan politik, dan koordinasi serta pemantauan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Penugasan ini merupakan

kelanjutan dari penugasan pemerintah yang telah mulai dijalankan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2008. Hibah tersebut merupakan bantuan dari negara-negara donor/mitra dan lembaga internasional yang dipimpin oleh UNDP dan bekerjasama melalui kerangka kerja sama bilateral dan multilateral.

Koordinasi oleh Kementerian PPN/Bappenas bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan efektivitas proyek bantuan UNDP bagi Pemilu. Penunjukkan Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator hibah tersebut mengacu kepada UU No. 22 tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu khususnya Pasal 121 yang dengan tegas menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menerima bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga bantuan dari luar negeri untuk penyelenggaraan pemilu untuk memfasilitasi KPU harus dikelola oleh Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian PPN/Bappenas. Di samping Undang-undang tersebut, penugasan tersebut juga mengacu kepada surat Ketua KPU kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1666/15/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008 perihal Koordinasi hibah bantuan Pemilu KPU. Surat tersebut berisi rekomendasi Ketua KPU agar Kementerian PPN/Bappenas mengorganisasikan program bantuan kepemiluan bagi pemerintah Indonesia dari institusi donor baik yang bersifat multilateral maupun bilateral.

Dalam prosesnya, koordinasi dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dilakukan melalui perangkat *Steering Committee*/Tim Pengarah yang beranggotakan pejabat perwakilan lembaga donor dan Eselon I; serta *Technical Committee*/Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Eselon II dari kementerian/lembaga terkait. Salah satu tugas utama Tim Teknis adalah membahas program dan kegiatan yang dibiayai dari hibah ini secara terperinci dan memberikan rekomendasi kepada Tim Pengarah, yang bertugas mengambil keputusan mengenai program dan kegiatan apa saja yang dapat disetujui. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipastikan keamanannya, baik dari aspek politis, yuridis, teknis maupun keamanan. Di samping itu, koordinasi hibah Pemilu yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas juga menghasilkan dokumen *Standard Operation Procedure* (SOP) yang diharapkan dapat memberikan koridor yang lebih jelas dalam koordinasi hibah.

Permasalahan dan hambatan dalam pengelolaan hibah tersebut sebagian besar terkait dengan mekanisme pengadministrasian hibah yang masih belum jelas dan terkomunikasikan

dengan baik kepada semua pihak yang terkait. Prosedur pengadministrasian hibah yang melibatkan Bappenas sebagai institusi pelaksana dan Kementerian Keuangan masih belum jelas. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, pada tahun 2009 Kementerian PPN/Bappenas berupaya mendaftarkan dan mencantumkan Hibah Pemilu 2009 di dalam DIPA Bappenas sehingga merupakan salah satu hibah Kementerian PPN/Bappenas pertama yang ditangani dengan mekanisme "on budget, off treasury." Dalam konteks ini muncul beberapa masalah, misalnya kesulitan mencantumkan nilai hibah yang sebenarnya di dalam DIPA Kementerian PPN/Bappenas sehingga nilai hibah di dalam DIPA jauh lebih kecil dari realisasi hibah yang dilakukan sepanjang tahun 2009. Permasalahan lainnya adalah rumitnya prosedur pelaporan realisasi hibah kepada KPPN Khusus, terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 40 mengenai Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH) yang mulai berlaku pada tahun 2009. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah: a) berkonsultasi dengan berbagai pihak yang dinilai kompeten mengenai peraturan-peraturan tersebut beserta implementasinya dan berupaya semaksimal mungkin mengikuti prosedur yang berlaku; dan b) memberikan masukan kepada pihak berwenang mengenai perlunya sosialisasi peraturan yang ada sekaligus perumusan solusi bagi permasalahan yang seringkali muncul terkait dengan hal tersebut. Namun demikian, upaya konsultasi dengan berbagai pihak terkait di lembaga yang berwenang tersebut juga belum membuahkan hasil yang optimal, mengingat adanya pemahaman dan penjelasan yang belum seragam mengenai prosedur yang berlaku dan mengenai pengelolaan hibah.

5.j. Koordinasi penyusunan Buku Pegangan (*Handbook*) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2009.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009 Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Buku Pegangan (*Handbook*) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2009 dengan tema "Penguatan Ekonomi Daerah: Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global". Buku ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan atau pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan arah dan rambu-rambu yang dapat dijadikan pertimbangan oleh daerah dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Tujuan dari penyusunan Buku Pegangan (*Handbook*) 2009 ini adalah:

- Menjelaskan penyebab terjadinya krisis keuangan global saat ini.
- Meningkatkan pemahaman akan dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- Mengemukakan arah kebijakan yang dapat diambil dalam mencegah dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global.
- Memantapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi dampak krisis keuangan global.
- Menguraikan kegiatan prioritas pembangunan dan kebijakan anggaran tahun 2008 berkenaan dengan fokus penguatan ekonomi daerah.
- Menguraikan perkembangan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah hingga saat ini.

Buku Pegangan (*Handbook*) 2009 memuat pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta RKP 2009 yang bertemakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan dengan prioritas pembangunan nasional dalam peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; percepatan pertumbuhan berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; dan peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam negeri. Dibandingkan dengan Buku Pegangan Tahun 2008, Buku Pegangan (*Handbook*) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2009 relatif lebih baik antara lain lebih rinci.

Adapun hambatan umum yang dihadapi dalam penyusunan Buku Pegangan (*Handbook*) 2009, antara lain: a) kesulitan dalam mendapatkan data dan informasi yang terkini dari Pemda; b) kurangnya koordinasi dengan sektor dan daerah untuk mendapatkan dokumen perencanaan sektor dan daerah; dan c) terbatasnya waktu penyusunan buku pegangan tersebut. Sedangkan upaya antisipasi yang dilakukan dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang antara lain, a) mendorong pemda untuk membangun data base yang komprehensif, terkini dan diperbaiki (*update*) secara berkala; b) meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan para *stakeholders*; dan c) pengaturan rencana kerja dan pelaksanaan secara ketat.

5.k. Koordinasi Penataan Ruang

Koordinasi kegiatan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan sosialisasi penataan ruang pada tingkat nasional, daerah dan sektoral dalam rangka memecahkan atau mengurangi konflik pemanfaatan ruang nasional dan kawasan-kawasan strategis. Berdasarkan Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu *stakeholders* penting dalam BKPRN yaitu sebagai sekretariat BKPRN. Berdasarkan Keppres tersebut, tugas Sekretariat meliputi :

- a. Menyusun jadwal dan rencana kerja tahunan BKPRN berdasarkan hasil sidang BKPRN;
- b. Menyusun agenda dan menyiapkan bahan sidang BKPRN;
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRN;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional untuk disampaikan oleh Ketua BKPRN kepada Presiden; dan
- f. Mendistribusikan hasil-hasil sidang BKPRN kepada seluruh anggota dan pihak terkait;
- g. Melaksanakan fungsi administratif dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BKPRN;
- h. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Sekretariat BKPRN;
- i. Menyusun laporan tentang pelaksanaan tugas Sekretariat BKPRN dan menyampaikannya kepada Ketua BKPRN; dan
- j. Melakukan kegiatan kehumasan.

Kegiatan yang dilakukan oleh BKPRN meliputi forum koordinasi dalam rangka penyelesaian RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; forum konsultasi dalam rangka penyelesaian konflik pemanfaatan ruang; sosialisasi kebijakan penataan ruang; media informasi publik untuk pemahaman penataan ruang; forum koordinasi dalam rangka percepatan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) peraturan pelaksana UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu : RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Sumber Daya Alam, penyusunan RPP tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan

Ruang, RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, dan RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan; terselenggaranya forum koordinasi percepatan penetapan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) RTR 5 pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dan 2 Raperpres RTR Kepulauan yaitu Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara; dan terselenggaranya rapat kerja penyusunan agenda kerja tahunan maupun jangka menengah BKPRN.

Berbagai keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan koordinasi penataan ruang nasional antara lain :

- Terciptanya keserasian antara RTRWN, RTRWP serta RPJM/RPJPN
- Terciptanya keserasian antara RTRWP, RTRW Kab/Kota serta RPJM/RPJPN
- Terselenggaranya konflik pemanfaatan ruang yang bersifat *win win solution*
- Terwujudnya kesepahaman dalam percepatan penetapan PP amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan penataan ruang antar berbagai instansi di pusat dan daerah
- Terwujudnya kesepahaman dalam percepatan penetapan Perpres RTR Pulau Besar
- Terwujudnya komunikasi interaktif antara stakeholders tentang kebijakan penataan ruang
- Terwujudnya pemahaman *stakeholders* tentang kebijakan penataan ruang

Dalam kurun waktu tahun 2009 beberapa capaian yang telah diwujudkan adalah:

- Disahkannya Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN sebagai pengganti Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional, sebagai landasan dalam koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- Terdapat 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Bali yang menetapkan Perda RTRW Provinsinya, dan 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Nabire, dan Kota Banda Aceh yang menetapkan Perda RTRW Kab/Kota.
- Terselenggaranya Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 sebagai salah satu mekanisme untuk mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

- Penyelesaian konflik tata ruang melalui forum BKPRN, seperti dalam kasus pembangunan jalan tol dan PLTU Kabupaten Cirebon, pengeluaran fatwa Rencana Tata Ruang Kabupaten Bekasi terkait dengan wilayah studi Pertamina, kegiatan *stock taking* pada provinsi, alih fungsi lahan kehutanan, kawasan pertambangan dalam kawasan kehutanan.
- Terlaksananya beberapa sosialisasi melalui kegiatan: sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang; kegiatan pameran dalam rangka Hari Tata Ruang dan Dies Natalis 50 Tahun Jurusan Teknik Planologi ITB; penyediaan media informasi publik untuk pemahaman penataan ruang melalui website www.bkprn.org.

Beberapa kendala yang dinilai masih menghambat antara lain adalah belum semua instansi sektoral dalam perencanaan kegiatannya sudah mengacu pada kebijakan penataan ruang. Hal ini masih perlu ditingkatkan kembali yaitu dengan melakukan pertemuan yang lebih intensif membahas permasalahan riil dan mensinkronkan program dan kegiatan K/L dengan kebijakan penataan ruang.

5.1. Koordinasi Peningkatan Upaya Mitigasi Dan Pengurangan Resiko Bencana Alam

Pada kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2004–2009 berbagai kejadian bencana telah mewarnai perjalanan pembangunan selama hampir lima tahun. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD dan Nias, sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004–2009 telah terjadi beberapa bencana gempa bumi antara lain di pesisir selatan Provinsi Jawa Barat dan gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat pada September 2009. Berbagai kejadian bencana tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar serta berdampak pada hancurnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana, maka dilakukan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif menjadi upaya pengurangan risiko bencana.

Dalam rangka mitigasi, pengurangan risiko bencana, serta penanggulangan bencana, sesuai dengan arahan Presiden kepada Menteri PPN/Bappenas, diberikan tugas untuk menyusun kebijakan kepada upaya mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya (*ad hoc*) yang diberikan oleh Presiden seperti penilaian awal kerusakan dan kerugian, penyusunan rencana aksi

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana melalui koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Tugas-tugas tersebut telah dilaksanakan yaitu dengan mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan yang telah dimulai sejak RKP 2007. Dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan sejalan dengan visi dan misi Presiden terpilih 2010-2014, pada tahun 2009 penanggulangan bencana masuk dalam prioritas pembangunan nasional yaitu prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dalam rancangan RPJMN 2010-2014. Kemudian terkait dengan upaya peningkatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan telah dilaksanakan evaluasi terhadap Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009 yang kemudian menjadi masukan bagi penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 sebagai lanjutan dari Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009. Kedua rencana aksi tersebut merupakan salah satu respon Pemerintah terhadap komitmen internasional yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (*Framework for Action*) 2005-2015 untuk Pengurangan Risiko Bencana.

Dalam tahun 2009, telah juga disusun kerangka keberlanjutan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD-Nias, Sumatera Utara berupa Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi NAD-Nias, Sumatera Utara 2010-2012. Selain itu, telah juga dilakukan penilaian awal kerusakan dan kerugian pasca bencana gempa bumi di pesisir selatan Provinsi Jawa Barat serta pasca bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari penyusunan laporan situasi harian penanganan pasca bencana.

Dalam rangka peningkatan koordinasi pengintegrasian penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, rencana pembangunan ke depan diarahkan pada upaya-upaya untuk :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan bidang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
2. Mendorong pengintegrasian penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana kedalam perencanaan sektoral (kementerian/lembaga) terkait;

3. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah (pusat, K/L) dan pemerintah daerah dalam perencanaan bidang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemulihan di wilayah pasca bencana selaras dengan perencanaan dan penganggaran reguler.

5.m. Koordinasi Kebijakan Prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 bahwa DAK dilaksanakan untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional dengan sumber pembiayaan dari APBN. Prioritas nasional tersebut ditetapkan melalui prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang dan kegiatan prioritas nasional yang akan dibiayai melalui DAK sebagai bahan masukan bagi penyusunan RKP.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan menghindari duplikasi kegiatan dan pembiayaannya sejak tahun 2008 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas berupaya mendorong pengalihan secara bertahap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan kementerian/lembaga (K/L, sesuai peraturan perundang-undangan), untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme DAK agar tidak ada duplikasi dalam pembangunan di daerah.

Adapun permasalahan atau hambatan yang ditemui dalam kegiatan koordinasi strategis lintas wilayah ini antara lain:

- 1) Masih adanya keengganan di beberapa K/L untuk menyerahkan kegiatannya ke daerah.
- 2) Belum harmonisnya berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain pada bidang pendidikan, penanganan bencana, dan perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Masih banyaknya tuntutan berbagai pihak untuk membentuk daerah-daerah otonom baru. Pada satu sisi, pembentukan daerah otonom baru mampu menghadirkan pemerintahan daerah yang lebih dekat kepada masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu yang secara geografis terpencil atau sulit aksesnya, namun pada sisi lainnya kehadiran pemerintahan di daerah otonom baru belum secara cepat mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran daerah otonom baru, menambah beban APBN

terutama terkait dengan upaya melengkapi berbagai sarana dan prasarana serta personil instansi vertikal di daerah.

- 4) Masih banyak daerah yang terlambat dalam penetapan APBD sehingga menghambat laju pembangunan daerah masing-masing.
- 5) Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi isu yang dinamis dan melibatkan banyak aktor di berbagai tingkat pemerintahan sehingga isu ini menjadi kompleks dan bersifat lintas sektor dan wilayah.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan di atas, adalah dengan melaksanakan pembahasan secara formal dan informal dengan berbagai *stakeholders* terkait. Disadari bahwa permasalahan tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan sendiri dan dalam waktu singkat. Untuk itu, koordinasi dengan instansi terkait tersebut akan terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

5.n. Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas secara intensif sejak tahun 2008 telah melakukan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Keputusan Meneg PAN No. Kep.15/M.PAN/12/ 2008 dan No. Kep.04/M.PAN/04/2009. Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas berisi berbagai program dan kegiatan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan termasuk penataan program, kegiatan dan anggaran sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja tersebut di atas. Pada tahun 2009, Dokumen Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas telah dinilai Tim Independen yang ditunjuk oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang dikoordinasikan Kementerian PAN dan RB, dan sudah ada penyampaian surat dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional termasuk usulan tunjangan kinerjanya kepada Kementerian Keuangan. Dari hasil penilaian dokumen usulan, Bappenas memperoleh nilai 3,68 dari skala 4, lebih tinggi dari 2 instansi lain yang dinilai pada tahun yang sama.

Agenda reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas meliputi 3 komponen utama dalam pembenahan aparatur negara atau birokrasi yaitu penyempurnaan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (manajemen) termasuk penataan kegiatan dan anggaran, serta penataan sumber daya manusianya (SDM). Sesuai dengan 3 tahapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas, yaitu tahapan 1)

Pembangunan/Pembenahan Sistem, 2) Sosialisasi dan Implementasi 3) Mengukur Dampak/Perubahan dapat dijelaskan pencapaian atas persiapan rencana pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2009 sebagai berikut:

a. Tahap 1: Pembangunan/Pembenahan Sistem (Tahun 2008-2009)

Sebagai kelanjutan pembangunan/pembenahan sistem mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas telah diselesaikan beberapa sistem atau mekanisme dalam tahun 2008-2009 di bidang kelembagaan, ketalaksanaan, dan sumber daya manusia Adapun sistem atau mekanisme yang telah dibangun/dibenahi adalah: a) bidang kelembagaan, telah dilakukan penataan peran dan kewenangan organisasi Kementerian PPN/Bappenas melalui pelaksanaan evaluasi organisasi Kementerian PPN/Bappenas yang melibatkan *stakeholders*, baik ditingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan daerah (propinsi/kabupaten/kota) serta masyarakat (perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi). Hasil evaluasi tersebut telah menjadi masukan bagi penetapan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014, penyempurnaan organisasi serta tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional yang akan menitikberatkan pada kewenangan kelembagaan kebijakan pembangunan nasional (*think tank*), penyempurnaan peta strategi dan ditindaklanjuti penetapan indikator kinerja utama (KPI) di tingkat unit kerja Menteri, unit kerja eselon I dan II sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 disertai dengan kelengkapan kamus indikator atas kinerja unit kerja eselon I dan II; b) bidang ketatalaksanaan, telah dilakukan penyempurnaan pedoman perencanaan Kementerian PPN/Bappenas termasuk pengaturan terhadap penetapan satuan biaya kegiatan unit kerja eselon, pedoman mekanisme kerja jabatan fungsional perencana (JFP); dan c) bidang sumberdaya manusia, telah dihasilkan beberapa sistem atau mekanisme antara lain rancangan pedoman sistem kehadiran pegawai,

b. Tahap 2: Sosialisasi dan Implementasi (Tahun 2009-2010, dan seterusnya)

Tahap ini adalah tahap penerapan berbagai kebijakan yang telah dibangun, dibenahi atau ditata pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2009 dilakukan kegiatan sebagai berikut: a) penerapan sebagian pedoman atau SOP (*business process*) antara lain Pedoman Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk internal Kementerian

PPN/Bappenas, Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas, serta Pedoman Pengelolaan Asset Kementerian PPN/Bappenas, Pedoman Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014; b) penyempurnaan pedoman sistem kehadiran pegawai (*finger print*) untuk diterapkan pada April 2010; c) pengukuran kinerja unit kerja eselon I dan II berdasarkan Renstra 2010-2014 dan Renja 2010; d) penataan organisasi Kementerian PPN/Bappenas dengan perubahan nomenklatur Staf Ahli Menteri. Pada tahun 2010 akan dilanjutkan dengan penataan organisasi Bappenas. Seluruh produk program dan kegiatan tersebut telah dilakukan kegiatan sosialisasi dari awal proses penyusunan sampai ditetapkan menjadi peraturan Kementerian PPN/Bappenas. Implementasi kebijakan-kebijakan yang telah disusun dalam rangka reformasi birokrasi tidak terbatas sampai dengan tahun 2010 saja, tetapi disempurnakan secara terus menerus (*continuous improvement*) pada tahun-tahun berikutnya.

c. Tahap 3: Mengukur Dampak/Perubahan (2010-2011 dan seterusnya secara berkala)

Tahap ketiga adalah tahap untuk mengukur dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang telah dihasilkan pada tahun 2009. Dampak/perubahan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dihasilkan pada tahun 2009 diharapkan dapat menjadi dorongan untuk perubahan manajemen (*change management*) di Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Nasional. Perubahan manajemen tersebut akan diikuti dengan keberadaan organisasi dan tatakerja yang jelas, pengembangan sistem yang terukur, kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan membangun budaya kerja yang produktif, inovatif dan bersemangat tinggi.

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur adalah program untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas dan unit-unit perencana baik di tingkat pusat dan daerah. Peningkatan kualitas aparatur perencana pada unit-unit perencanaan di tingkat pusat dan daerah bertujuan untuk menghasilkan para perencana yang profesional dalam menyusun rencana pembangunan baik rencana pembangunan nasional daerah

jangka panjang, menengah dan tahunan (RPJP, RPJM, dan RKP), dan Renstra serta Rencana Tahunan (K/L/pemda/dinas).

B.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan sasaran program pengelolaan sumber daya manusia aparatur manusia aparatur, terdapat 2 sasaran yang akan dicapai: 1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana dan kapasitas instansi perencanaan di instansi lain di di pusat dan daerah; dan 2) meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun pengukuran pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

<p style="text-align: center;">Tabel 28 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2009 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR</p>					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana dan kapasitas instansi perencanaan di pusat dan di daerah.	% alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang studi S2/S3.	80 %	80 %	100 %
		% alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah.	80 %	80 %	100 %
		% alumni diklat non gelar substantif yang dinilai mampu melakukan aplikasi pengetahuan hasil diklat ke dalam proses penyusunan rencana.	80 %	80 %	100 %
		% alumni diklat non gelar penjenjangan fungsional perencana yang telah diangkat ke dalam atau naik ke jenjang jabatan perencana yang lebih tinggi.	80 %	80 %	100 %
		% perencana (JFP) memahami dokumen peraturan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas serta pengumpulan angka kreditnya.	80 %	80 %	100 %
2	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian PPN/Bappenas.	% pegawai merasakan relevansi yang positif antara diklat pegawai dengan peningkatan kompetensi pegawai Bappenas.	80 %	80 %	100 %
		% penilaian pejabat eselon I dan II yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat.	80 %	80 %	100 %

1. Prosentase alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang gelar (S2/S3) dan prosentase alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah

Dalam hal pencapaian sasaran pertama program pengelolaan sumber daya manusia aparatur, yaitu “meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur perencana dan kapasitas instansi perencanaan di pusat dan di daerah” tercermin dari indikator kinerja *output* dan *outcomes* dalam: (1) penyelenggaraan diklat gelar; (2) penyelenggaraan diklat non gelar; dan (3) penyusunan ketentuan dan mekanisme pelaksanaan jabatan fungsional perencana (JFP).

Kirkpatrick (1959), seorang ahli *training evaluation* menyatakan bahwa model evaluasi pelatihan memiliki 4 (empat) tingkat pengukuran, meliputi: (1) *reaction*, mengukur reaksi peserta. Hal apa yang difikirkan dan dirasakan oleh peserta pelatihan tentang pelaksanaan diklat, (2) *learning*, menilai sejauhmana peserta mampu menyerap materi pelatihan berupa pengetahuan dan keahlian, dan berhasil menyelesaikan seluruh proses pembelajaran, (3) *behaviour*, mengukur sejauhmana peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, dan menampilkan terjadinya perubahan perilaku, dan (4) *results*, menilai apakah perubahan perilaku peserta tersebut mampu mempengaruhi para *stake-holders*, organisasi dan lingkungannya.

Dengan demikian, untuk itu dilakukan penilaian indikator *outcome* dari kegiatan pengelolaan diklat agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dan menjelaskan manfaat diklat dan implikasi dari berfungsinya *output* yang diperoleh. Dalam hubungan ini, sebagaimana nampak pada tabel di atas, program pengelolaan sumber daya manusia aparatur masih belum sepenuhnya dapat menyajikan data-data realisasi tingkat capaian indikator *outcome*, karena pengukuran kinerja *outcome* untuk kegiatan tahun 2009, baru akan dilakukan pada tahun 2010. Sebagai contoh untuk menentukan persentase peserta yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan lulus program S2/S3 atau persentase alumni yang ditempatkan kembali pada unit kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, baru akan dapat dinilai pada tahun 2010, dan dilaporkan pada tahun 2011 (dalam Lakip 2010). Namun demikian untuk kegiatan tahun 2009 sudah dilakukan evaluasi untuk diklat gelar, khususnya S2 Linkage Belanda.

Lebih jauh, apabila mengacu kepada teori yang dikemukakan Kirkpatrick tersebut, semestinya yang menjadi indikator *outcome* adalah berfungsinya alumni, dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari suatu diklat, ke dalam proses penyusunan

rencana pembangunan. Indikator ini menurut Kirkpatrick dikenal dengan tingkat pengukuran *behaviour*, tidak dapat langsung diukur pada saat selesai diklat (*just in time*), namun memerlukan waktu lebih lama setelah alumni ditempatkan kembali oleh instansi asalnya. Begitu pula indikator manfaat dan dampak hasil pelatihan terhadap kapasitas dan kualitas organisasi sebagai tingkat pengukuran *results* akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi, dengan metode pengukuran yang lebih kompleks.

Mengacu kepada model evaluasi pelatihan Kirkpatrick (1959) yang dijelaskan di atas, keberhasilan peserta diklat gelar Bappenas dapat dinilai dalam aspek tingkatan kedua, yaitu keberhasilan pembelajaran (*learning*) dan sebagian kecil untuk aspek *behaviour*. Nampak pada tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), jumlah peserta yang sudah berhasil lulus atau menyelesaikan pendidikan S2 berjumlah masih belum dapat dilaporkan, terutama untuk program linkage Belanda dan Jepang dimana ada beberapa peserta yang belum melaporkan kepada Pusbindiklatren. Namun demikian untuk penyelenggaraan diklat non gelar, telah dapat diketahui untuk kelulusan peserta, yaitu pada tahun 2009 dari 1.192 peserta yang ditargetkan mengikuti diklat dan lulus, berhasil mencapai angka 1.133 orang atau 103% dari target.

Sedangkan untuk penerapan materi diklat untuk diklat gelar, baru dilakukan untuk S2 *linkage* Belanda yang hasilnya menunjukkan cukup positif. Pada tahun 2009, dari hasil evaluasi menyatakan bahwa 90% peserta menyatakan bahwa diklat gelar *linkage* Belanda sangat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat diaplikasikan di tempat kerja. Sedangkan pelaksanaan diklat non gelar, dalam hal indikator *outcome* dari hasil evaluasi diklat non gelar substantive, menunjukkan hampir 80% alumni yang dinilai berhasil melakukan aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh ke dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini berarti telah mencapai indikator kinerja *outcome* sebesar 100% dari target sebesar 80%. Dalam hal rewiu kebijakan pelaksanaan JFP, melalui penyusunan beberapa ketentuan, telah berhasil diselesaikan 1 (satu) dokumen atau dinilai berhasil mencapai indikator kinerja *output* sebesar 100%.

Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran antara lain : (a) melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih terjadwal, agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan; (b) melakukan pemantauan intensif terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan, dan (c) melakukan evaluasi yang lebih sistematis

terhadap penyelenggaraan diklat dan pelaksanaan JFP, untuk mengukur pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitas seluruh instansi perencanaan dan kualitas rencana pembangunan.

Disadari bahwa data sasaran tersebut relatif sulit dan memerlukan waktu relatif lama, namun hal tersebut tetap perlu dilakukan untuk melihat *outcome* atau dampak dari keikutsertaan pegawai dalam diklat perencanaan pembangunan.

2. Prosentase alumni pegawai merasakan relevansi diklat pegawai dalam meningkatkan kompetensi pegawai Bappenas dan prosentase penilaian pejabat eselon I dan II yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat

Dalam mencapai sasaran kedua, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana di Kementerian PPN/Bappenas, dicerminkan dari kegiatan diklat pimpinan, teknis, fungsional dan prajabatan. Kinerja pencapaian sasaran kedua juga dinilai berhasil berdasarkan indikator kinerja *output*. Penyelenggaraan diklat teknis dan diklat prajabatan dinilai telah berhasil mencapai persentase tingkat keikutsertaan peserta yang sangat tinggi. Peserta diklat teknis tahun 2009 diikuti 550 orang atau 88% dari jumlah 625 orang rencana yang ditargetkan. Sementara itu, peserta diklat prajabatan mencapai persentase tingkat keikutsertaan 90% karena 36 orang dari 40 orang yang direncanakan hadir mengikuti diklat.

Pelaksanaan diklat yang dinilai masih jauh dari rencana yang ditargetkan adalah diklat bagi pejabat struktural (diklatpim). Dari 39 orang yang ditugaskan yang hadir hanya 11 orang atau 28,20%. Hal ini disebabkan tidak memperoleh ijin atasan langsung, juga karena penolakan calon peserta dengan berbagai alasan. Diklat lainnya yang menunjukkan persentase tingkat keikutsertaan sangat rendah adalah diklat fungsional penjenjangan perencana. Hanya 18 orang atau 30,50% yang mampu mengikuti diklat, karena kegagalan memenuhi persyaratan. Salah satu syarat yang paling banyak gagal dipenuhi oleh calon peserta adalah tidak mampu mengumpulkan dokumen untuk memperoleh sejumlah angka kredit yang diminta sebagai jumlah angka kredit minimal. Di samping itu, dalam proses perencanaan diklat ini, terdapat kesulitan melakukan prediksi jumlah peserta.

Beberapa permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran bagi pegawai yang telah mengikuti diklat sehingga tidak merasakan relevansi diklat pegawai dalam meningkatkan kompetensinya adalah (1) pegawai mengikuti diklat bukan atas kemauannya, tetapi hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Biro Sumber Daya Manusia; (2) diklat yang diikuti

tidak sesuai dengan diklat yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan pegawai tersebut, sehingga tidak mendapat tanggapan yang positif; (3) dalam menjalankan diklat kadang-kadang pegawai tersebut mendapat tugas lain dari atasannya, sehingga akan mengganggu konsentrasi pegawai dalam mengikuti diklat.

Hal-hal yang sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kinerja sasaran 2 (kedua) tersebut di atas, adalah: (1) peserta diklat adalah pegawai yang memang ingin atau berminat mempelajari ilmu yang akan diajarkan dalam diklat; (2) pelaksanaan diklat harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan tugas pegawai, sehingga pegawai dapat mengikutinya dengan penuh antusias; (3) pejabat eselon I dan II atau atasan langsung dihibau agar tidak memberikan tugas kepada pegawai yang sedang mengikuti diklat.

B.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan SDM aparatur perencana di tingkat pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan pencapaian kinerja kegiatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 29 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR					
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	<p>Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SDM aparatur baik ditingkat pusat dan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP - Penyusunan dokumen pengaturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana di seluruh Indonesia 	<p>Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri</p> <p>Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP</p> <p>Jumlah dokumen yang mengatur pelaksanaan jabatan fungsional perencana di seluruh Indonesia</p>	<p>511 orang</p> <p>1.192 orang</p> <p>1 dokumen</p>	<p>464 orang</p> <p>1.233 orang</p> <p>1 dokumen</p>	<p>90 %</p> <p>103 %</p> <p>100 %</p>
2	<p>Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan 	<p>Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan 	<p>39 orang</p> <p>625 orang</p> <p>59 orang</p> <p>40 orang</p>	<p>11 orang</p> <p>550 orang</p> <p>18 orang</p> <p>36 orang</p>	<p>28.21 %</p> <p>88 %</p> <p>30.50 %</p> <p>90 %</p>

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan gelar dan non gelar di dalam dan luar negeri bagi aparatur perencana baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja kegiatan tahun 2009 pada Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tahun 2009. Secara umum, kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dinilai relatif berhasil sesuai dengan indikator kinerja *output yang* telah ditetapkan pada awal tahun 2009. Sedangkan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja *outcome untuk* kegiatan tertentu, belum dapat dilaporkan pada LAKIP 2009, karena hasil pengukurannya akan diperoleh pada tahun 2010 dan dilaporkan dalam LAKIP 2010.

Kegiatan utama dari program di atas adalah penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar, serta perumusan kebijakan pembinaan jabatan fungsional perencana (JFP) di seluruh instansi perencanaan di Indonesia, pusat dan daerah. Berdasarkan indikator *output*, keberhasilan penyelenggaraan diklat pada tahun 2009 tersebut tercermin dari persentase penyerapan dana dan persentase peserta yang berhasil menyelesaikan pendidikan gelar S2/S3, dan alumni yang telah mengikuti dan lulus diklat non gelar. Persentase pencapaian penyerapan dana adalah sebesar 86% atau lebih tinggi dibanding tahun 2008 sebesar 80,6%. Peserta diklat gelar yang berhasil ditempatkan di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri berjumlah 464 orang atau 90% dari rencana yang ditargetkan; dan alumni yang berhasil menyelesaikan pendidikan S2 atau S3 berjumlah 428 orang atau 96% dari rencana yang ditargetkan. Sedangkan jumlah alumni diklat non gelar yang berhasil dicapai meningkat menjadi 1.133 orang atau 103% dari jumlah yang ditargetkan.

Keberhasilan penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar pada tahun 2009 tersebut juga didukung oleh kegiatan penunjang lain seperti seleksi peserta dan pemantauan yang efektif. Kinerja pendaftaran dan seleksi menunjukkan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sangat baik, yaitu persentase tingkat penyerapan dana 94,03% dengan jumlah peserta yang mengikuti seleksi 4.000 orang atau 89,06% dari rencana; dan calon peserta yang berhasil lulus seleksi TPA dan TOEFL dan berhak memperoleh beasiswa sebanyak 464 orang atau 90% dari rencana yang ditargetkan. Kegiatan pemantauan diklat gelar dinilai mencapai tingkat kinerja 100%. Kegiatan pemantauan ini telah berhasil memperoleh informasi mengenai kemajuan prestasi belajar peserta, dan mengidentifikasi secara lebih awal mengenai masalah akademik

yang dihadapi peserta, dan secepatnya merumuskan tindakan korektif yang diperlukan. Persentase tingkat capaian penyerapan dana kegiatan pemantauan mencapai kinerja 93,69%.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar pada tahun 2009, serta pelaksanaan kebijakan jabatan fungsional perencana antara lain meliputi:

1) Seleksi: Jumlah calon peserta semakin berkurang

Sama dengan permasalahan pada tahun sebelumnya, bahwa jumlah calon peserta penerima beasiswa 2.615 orang yang jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih tetap rendah dibanding perkiraan sebanyak 4.000 orang sesuai dengan anggaran kegiatan yang tersedia. Penentuan jumlah calon peserta tersebut didasarkan pada pengalaman selama ini yang menunjukkan kecenderungan penurunan calon peserta. Kekurangan calon peserta, terutama terjadi dari instansi pemerintah daerah di luar Jawa. Bagi calon peserta dari luar Jawa sebenarnya telah dirumuskan kuota dan kriteria seleksi yang berbeda dari daerah lain. Perbandingan jumlah peserta di antara instansi Pusat:Jawa:Luar Jawa ditetapkan dengan komposisi kuota 1:3:6. Perbandingan tersebut menggambarkan kesempatan menjadi penerima beasiswa lebih besar bagi calon peserta dari luar Jawa, yaitu 60% dari alokasi yang tersedia. Di samping itu, batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA) bagi calon peserta dari luar Jawa, juga telah diturunkan dari skor TPA serendah-rendahnya 525 menjadi serendah-rendahnya 500. Skor ini lebih rendah dibanding batas lulus calon peserta dari instansi pusat (565) dan Jawa (525). Kebijakan kriteria seleksi sebenarnya sudah diubah pada tahun 2008, yaitu batas kelulusan TPA untuk calon peserta instansi pusat yang bekerja di Luar Jawa menjadi sekurang-kurangnya 500. Sedangkan pada tahun 2009 juga sudah lebih khusus yaitu peserta yang berasal dari instansi pusat tetapi bekerja di luar Jawa dikelompokkan dalam kelompok "pegawai instansi pusat di luar Jawa", dengan menurunkan kriteria skor TPA menjadi 525. Dengan kuota dan batas lulus tersebut, ternyata masih belum mampu meningkatkan jumlah calon peserta yang melamar dan lulus seleksi. Tahun 2009, jumlah seluruh pelamar berjumlah 2.615 orang, dari jumlah tersebut tingkat kelulusan seleksi TPA dan bahasa Inggris (TOEFL) hanya mencapai persentase 31% (813 dari 2615 orang). Namun demikian dengan kriteria tersebut, telah berhasil meningkatkan proporsi

calon dari luar Jawa yang pada tahun 2009 mencapai 45%, dengan perincian dari instansi luar Jawa 35% dan instansi pusat luar Jawa 10%.

Beberapa alternatif solusi untuk masalah ini antara lain : (a) mengubah komposisi kuota, namun hal ini secara politis harus memperoleh persetujuan DPR agar prioritas terhadap peningkatan kompetensi perencana pemda di luar Jawa tidak berubah; atau (b) mengubah aturan tentang diperbolehkannya D4 untuk mengikuti seleksi ini.

2) Proporsi asal peserta

Komposisi perbandingan instansi asal dari peserta diklat dalam 2 tahun terakhir ini masih belum mampu dipenuhi. Hasil seleksi tahun 2008 menunjukkan perbandingan prosentase Jawa : Luar Jawa : Pusat-Luar Jawa sebesar 30% : 29% : 31% : 10%. Sedangkan hasil seleksi tahun 2009 menunjukkan proporsi instansi Pusat : Jawa : Luar Jawa : Pusat-Luar Jawa sebesar 31% : 35% : 24% : 10%. Berdasarkan hal tersebut, nampak jumlah peserta dari pemda di luar Jawa masih jauh dari harapan, yaitu 60%. Padahal aturan tentang komposisi tersebut di atas merupakan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2004 yang meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk sungguh-sungguh memberikan prioritas pada peningkatan kemampuan perencana pemda di luar Jawa.

Beberapa faktor penyebab rendahnya minat dan tingkat kelulusan seleksi ini adalah: (1) rendahnya kualitas sistem perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; (2) ketentuan syarat masa kerja PNS yang ditetapkan pemerintah daerah; (3) status kepegawaian calon peserta instansi pusat tapi bekerja di wilayah luar Jawa; (4) latar belakang pendidikan S1, (5) adanya beberapa peserta D4, dan (6) terbatasnya dukungan pembiayaan.

Saat ini, di dalam sistem rekrutmen PNS di daerah, ternyata masih terjadi proses yang tidak objektif, tidak terbuka dan sarat dengan praktek-praktek nepotisme. Akibatnya, ketika PNS yang memiliki kualitas baik dan mampu lulus TPA dan TOEFL sudah habis terseleksi dalam beberapa kali periode seleksi beasiswa, maka lambat laun akan semakin sulit menemukan calon peserta yang berkualitas, memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian, dan belum memperoleh kesempatan memperoleh beasiswa Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun upaya penyelesaiannya adalah dengan menyarankan dan mendiskusikan permasalahan tersebut dengan pimpinan instansi/pemerintah daerah agar rekrutmen peserta diklat dapat lebih baik dan mampu mengikuti program diklat gelar yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dilakukan dalam berbagai kesempatan, antara lain melalui surat dan rapat-rapat koordinasi diklat.

3) Terdapat peraturan pemerintah daerah yang mensyaratkan masa kerja PNS lebih lama

Persyaratan masa kerja bagi calon peserta ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun masa kerja di dalam status PNS 100%, pendidikan S1, dan golongan/pangkat IIIA. Beberapa pemerintah daerah tertentu menerapkan ketentuan yang biasanya melalui peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mensyaratkan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun. Akibatnya beberapa calon peserta yang telah lulus seleksi, tidak memperoleh ijin tugas belajar, karena belum mencapai masa kerja yang dipersyaratkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tahun 2009 dengan peserta dan pimpinan instansi pemda secara informal diperoleh beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab menurunnya jumlah calon peserta tersebut, yaitu : (a) terjadi perbedaan aturan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat gelar. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di beberapa pemda ada yang menerapkan aturan bahwa pegawai yang dapat dikirim ke Bappenas masih didasarkan urutan senioritas golongan pangkat yaitu golongan IIIC. Sedangkan golongan yang disyaratkan Kementerian PPN/Bappenas hanya setingkat golongan IIIA; (b) BKD di beberapa pemda juga seringkali tidak memiliki keinginan untuk meneruskan informasi yang diterima dari Pusbindiklatren kepada pegawainya; (c) ada kecenderungan pegawai pemda lebih berorientasi kepada jabatan yang dipangkunya selama ini dibanding kesempatan untuk meningkatkan tingkat pendidikan; atau (d) kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan Pusbindiklatren kurang efektif.

Adapun solusi yang sedang dilakukan juga untuk permasalahan nomor 3 di atas adalah mengubah ketentuan tentang perbandingan kuota dan kriteria peserta tersebut, dengan mempertimbangkan pula aspek-aspek: (a) keadilan bagi peserta lain dan (b) kemampuan peserta yang sebenarnya dan mencerminkan potensi untuk menyelesaikan pendidikan

pada jenjang yang lebih tinggi. Aspek kedua tersebut menjadi sangat penting bagi Pusbindiklatren Bappenas, untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dana yang diperuntukkan bagi calon peserta yang benar-benar potensial dan diperkirakan mampu menyelesaikan pendidikan pasca sarjana S2 atau S3. Hal ini terus didiskusikan dengan beberapa pemerintah daerah.

4) Peserta mengundurkan diri

Masih kurangnya target peserta diklat dalam tahun 2009, juga diakibatkan banyaknya peserta yang mengundurkan diri pada saat mereka sudah ditetapkan sebagai penerima beasiswa maupun pada saat mereka telah mengikuti kegiatan perkuliahan. Karena keterbatasan waktu, maka ada beberapa program studi yang tidak bisa mendapatkan pengganti, sehingga jumlah peserta berkurang. Penyebab utama masalah ini adalah (1) peserta tersebut mendapatkan promosi jabatan, sehingga mereka memilih untuk menduduki jabatan dari pada melanjutkan pendidikan, mengingat situasi di pemerintah daerah saat ini, kesempatan untuk mendapatkan jabatan sangat ketat, sehingga mereka lebih memilih bekerja sambil melanjutkan pendidikan di kota tempat mereka bekerja; (2) peserta mendapatkan beasiswa dari instansi/institusi lain, terutama beasiswa yang pendidikannya di luar negeri. Untuk mengatasi masalah ini, sebenarnya Bappenas telah menetapkan aturan bahwa apabila ada yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa, maka yang bersangkutan harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan sejak proses seleksi. Namun demikian, hal ini tetap tidak mengurangi niat peserta untuk mengundurkan diri, bahkan peserta tidak merasa keberatan untuk mengembalikan dana yang sudah digunakan. Oleh karena itu untuk menghindari pengunduran peserta di masa yang akan datang perlu ada “reward” dan “punishment” kepada instansi asal peserta, misalnya tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan diklat Pusbindiklatren Bappenas.

5) Masalah penempatan pembali peserta diklat gelar

Para peserta diklat gelar sering mendapat penugasan/penempatan kembali di instansi lain yang berbeda (bukan di Bappeda) dengan bidang ilmu S2 atau S3-nya, sehingga pemanfaatan pegawai tersebut menjadi tidak optimal.

Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan menyampaikan surat pengembalian dari Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas kepada setiap pimpinan instansi asal, yaitu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian instansi. Isi surat tersebut disamping menyatakan bahwa alumni telah menyelesaikan pendidikan gelar S2/S3, juga menghimbau agar yang bersangkutan ditempatkan di unit kerja dengan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan latar belakang studi S2/S3-nya. Disadari bahwa himbauan tersebut kurang kuat, namun hal itu yang saat ini maksimal dapat dilakukan mengingat Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki kewenangan atau akses untuk mengintervensi kebijakan dan pelaksanaan penempatan pegawai pemerintah daerah. Namun demikian, apabila pimpinan instansi pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mendasari pengembangan karir pegawai dengan kesesuaian kompetensi, maka pimpinan instansi asal peserta dapat bersinergis dengan tujuan diklat PNS dengan memanfaatkan alumni beasiswa Kementerian PPN/Bappenas dengan cara menempatkannya di instansi atau unit kerja yang tepat.

6) Pelaksanaan jabatan fungsional perencana belum efektif

Secara umum berbagai peraturan JFP yang sudah diterbitkan melalui Juklak dan Juknis JFP, dinilai masih belum efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi/Kota/Kabupaten. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikasi hasil pemantauan seperti: (a) sebagian besar perencana dan instansi perencanaan menyatakan belum mengetahui keberadaan JFP, (b) sebagian besar instansi perencanaan belum/tidak melaksanakan *inpassing*, dan (c) sebagian besar instansi belum membentuk Tim Penilai JFP instansi meskipun sangat paham terhadap juknis pembentukan Tim Penilai.

Kendala yang merupakan penyebab belum efektifnya pelaksanaan JFP sebagian besar karena: (a) jabatan fungsional masih dianggap tidak prestisius atau jabatan buangan, (b) fasilitas instansi dan dukungan atasan langsung lebih banyak diberikan kepada jabatan struktural dan (c) pengurusan penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat dianggap sulit dan *complicated*. Disamping itu, salah satu implikasi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yaitu pengembangan wilayah atau pembentukan pemerintah kota dan kabupaten baru telah menyebabkan (d) masih diperlukannya penambahan PNS

dan pengisian jabatan struktural, sehingga jabatan fungsional, khususnya JFP menjadi tidak populer.

Upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menyusun penyempurnaan kebijakan mengenai JFP secara proporsional dan mendiskusikannya dengan Kementerian PAN dan RB. Selain itu, juga dilakukan penyebaran informasi JFP melalui sosialisasi yang dilakukan Bappenas kepada instansi dan unit-unit kerja perencanaan di K/L dan Pemda.

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas

Pada tahun 2009 telah dilaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk para pegawai Kementerian PPN/Bappenas, seperti Diklat Pimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Prajabatan. Kesemuanya dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan diklat teknis dan diklat prajabatan dinilai telah berhasil mencapai persentase tingkat keikutsertaan peserta yang sangat tinggi. Peserta diklat teknis diikuti 550 orang atau 88% dari jumlah 625 orang rencana yang ditargetkan. Sementara itu, peserta diklat prajabatan mencapai persentase tingkat keikutsertaan 90% karena 36 orang dari 40 orang yang direncanakan hadir mengikuti diklat. Pelaksanaan diklat yang dinilai masih jauh dari rencana yang ditargetkan adalah diklat bagi pejabat struktural (diklatpim). Dari 39 orang yang ditugaskan yang hadir hanya 11 orang atau 28,20%. Diklat lainnya yang menunjukkan persentase tingkat keikutsertaan sangat rendah adalah diklat fungsional penjenjangan perencana. Hanya 18 orang atau 30,50% yang mampu mengikuti diklat, karena kegagalan memenuhi persyaratan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai dengan baik. Tingkat pencapaian dua target di atas adalah 80% dapat dianggap cukup berhasil, sedangkan dua target lainnya kurang berhasil, hanya mencapai di bawah 40%. Kondisi ini disebabkan: a) pegawai yang bersangkutan tidak memperoleh ijin dari atasan langsung; b) calon peserta enggan mengikuti diklat dengan berbagai alasan; dan c) bagi pejabat fungsional perencana (JFP) tidak mampu mengumpulkan dokumen untuk memperoleh sejumlah angka kredit yang diminta sebagai jumlah angka kredit minimal untuk dapat mengikuti diklat JFP yang dipersyaratkan; d) pegawai mengikuti diklat bukan atas kemauannya, tetapi hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Biro SDM sehingga merasa

tidak nyaman; e) Diklat yang diikuti tidak sesuai dengan diklat yang kebutuhan pegawai yang bersangkutan, sehingga cenderung menolak ikut diklat; f) pada saat mengikuti diklat, pegawai sering mendapat tugas lain dari atasannya, sehingga mengganggu konsentrasi pegawai dalam mengikuti diklat.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, akan terus dilakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

1) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan diklat

Beberapa alternatif solusi yang disarankan antara lain: (a) melakukan pemetaan jumlah pegawai di pemerintah daerah yang diperkirakan berpotensi dan mampu memenuhi persyaratan beasiswa Kementerian PPN/Bappenas; (b) mengirimkan surat penawaran dilampiri dengan *booklet* atau buku pedoman lengkap tentang ketentuan dan prosedur penyelenggaraan diklat gelar Pusbindiklatren Bappenas; atau (c) melakukan sosialisasi secara lebih intensif.

Beberapa solusi yang disarankan tersebut perlu juga didukung oleh langkah-langkah kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dan instansi asal yang lebih intensif melalui : (a) membangun komitmen instansi perencanaan para pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, terhadap penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar, sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur perencana; (b) melakukan berbagai sosialisasi dalam berbagai forum perencanaan, agar diperoleh pemahaman bahwa pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perencana tidak terlepas dari tujuan peningkatan kapasitas institusi, dalam lingkup dan metode *capacity building approach*, dan (c) mendorong instansi asal peserta untuk menentukan berbagai ketentuan dan peraturan yang mendukung kemudahan : (i) bagi calon peserta mengikuti seleksi beasiswa dan (ii) bagi alumni untuk memperoleh penempatan kembali di unit-unit kerja yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang studi.

2) Peningkatan efektifitas pelaksanaan JFP

Dalam tahun 2009 Kementerian PPN/Bappenas berupaya; (a) meningkatkan koordinasi dengan Sekneg, Kementerian PAN dan RB, BKN dan Kementerian Keuangan, untuk mempercepat proses penerbitan Keppres tentang tunjangan JFP, termasuk kepastian

pembebanan biaya tunjangan JFP untuk Pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten (b) melaksanakan Evaluasi terhadap data hasil pemantauan perlu diperdalam melalui berbagai kegiatan kajian, diskusi atau lokakarya, dengan tujuan: (a) menemukan permasalahan atau kendala yang merupakan faktor pengaruh terhadap efektif-tidaknya pelaksanaan JFP, (b) menyiapkan bahan-bahan penyempurnaan peraturan pelaksanaan JFP yang diperlukan, baik yang terkait dengan substansi: paradigma, prinsip, dan tujuan keberadaan JFP, maupun terkait dengan mekanisme pelaksanaan JFP. Evaluasi ini disamping akan melibatkan para *stakeholder JFP* dari kalangan birokrasi, juga perlu didukung oleh akademisi, ahli dan praktisi dalam bidang perencanaan dari perguruan tinggi, dan asosiasi perencana, (c) Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi Pembina JFP, perlu melakukan diversifikasi cara-cara penyebaran informasi yang memiliki jangkauan diseminasi yang lebih luas (baik kepada PNS yang berminat maupun dinas-dinas sektoral), melalui berbagai forum sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi di instansi perencanaan di seluruh Indonesia dan (d) peningkatan intensifikasi peran Pusbindiklatren Bappenas sebagai: pusat data dan informasi JFP, pusat kajian dan pengembangan JFP, pusat pelayanan dan komunikasi perencana dalam bentuk: pengelolaan *website*, penerbitan majalah, pelayanan perpustakaan, penyelenggaraan *workshop*, seminar dan lokakarya.

Dalam RPJMN tahun 2010 – 2014, Kementerian PPN/Bappenas sebagai Instansi pembina JFP, akan melakukan berbagai kajian komprehensif mengenai pengembangan kapasitas instansi perencanaan dengan fokus: (a) studi jabatan fungsional sebagai upaya peningkatan profesionalisme PNS, (b) studi efektifitas pengembangan jabatan fungsional dalam rangka *downsizing* struktur organisasi birokrasi, (c) studi tentang penyetaraan tugas, fungsi dan dukungan fasilitas jabatan fungsional dan jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah, dan (d) evaluasi dampak pelaksanaan JFP terhadap peningkatan kualitas *output* dan produktivitas instansi perencanaan.

3) Kajian yang terkait dengan Pola Karir Jabatan Fungsional

Diperlukan kajian yang terkait dengan Pola Karir Jabatan Fungsional dengan fokus: (a) studi validitas pengukuran prestasi kerja melalui penilaian angka kredit, (b) studi kecocokan pola karir perencana *competency based development* dengan karakteristik instansi

perencanaan, dan (c) studi penggunaan *merit system* dalam pelaksanaan jabatan fungsional perencana, baik di instansi pemerintah di pusat maupun di daerah.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara adalah program untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dibidang penyediaan sarana dan prasarana Kantor termasuk dalam penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, meliputi pengadaan peralatan dan pendukung kerja serta pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan termasuk peningkatan pengelolaan aset manajemen.

C.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pada program peningkatan sarana dan prasana terdapat sasaran yang akan dicapai: 1) menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai dan 2) kemudahan akses dan ketersediaan data/informasi dan teknologi informasi mutakhir untuk mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 30 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2009 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1	tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai	% sarana dan prasarana serta fasilitas kerja pendukung lainnya yang tersedia dengan baik	65%	65 %	100 %
2	Kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir	Waktu yang digunakan untuk mengakses data/informasi mutakhir	5 detik	3 detik	140 %

Berdasarkan tabel di atas, sasaran yang ditargetkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pegawai, baru terealisasi sebesar 100 %, sedangkan untuk sasaran kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir terealisasi lebih dari 100%. Seluruh pelaksanaan kegiatan mendukung penyediaan

fasilitas kantor berhasil dilaksanakan, namun secara keseluruhan belum memenuhi kebutuhan mengingat keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas kerja sesuai kebutuhan pegawai.

Permasalahan penting yang dihadapi Kementerian PPN/Bappenas dalam mencapai sasaran tersebut hingga saat ini antara lain keterbatasan ruang kantor dan tempat parkir sehingga pegawai tidak mempunyai fasilitas ruang kerja yang layak sesuai dengan standar ruang menurut jabatan pegawai. Hal ini juga mengakibatkan para tamu yang datang ke Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka berkoordinasi atau menghadiri rapat menjadi terlambat karena keterbatasan sarana parkir kendaraan. Upaya mengatasi permasalahan tersebut, antara lain pada tahun 2006 telah direncanakan akan dibangun gedung dan sarana parkir dengan menggunakan lahan yang memang sudah terbatas. Namun rencana ini dibatalkan, karena kondisi ekonomi yang tidak kondusif untuk membangun gedung dan ruang parkir tersebut sehingga beberapa alternatif solusi adalah mengatur ruang kerja kembali dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait mengenai kekurangan lahan parkir. Namun kebijakan tersebut tidak banyak memberikan manfaat karena masalah utamanya adalah keterbatasan ruangan dan tempat parkir.

C.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan pencapaian kinerja kegiatan pada Tabel dibawah ini.

<p style="text-align: center;">Tabel 31 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</p>					
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/Bappenas	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/ Bappenas	40 %	40 %	100 %
2	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	65 %	65%	100 %
3	Menyediakan kelengkapan data/Informasi yang diperlukan	% Kelengkapan data/informasi yang diperlukan	70 %	70%	100 %

Pencapaian keberhasilan kegiatan menyempurnakan manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian PPN/Bappenas sebesar 100%. Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan menyempurnakan manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan, serta kegiatan menyediakan kelengkapan data/Informasi yang diperlukan mencapai target 100 %.

D. Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik

Program penerapan pemerintahan yang baik adalah program untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dibidang pelayanan umum yang meliputi pelayanan penggajian, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor serta pendukung lainnya.

D.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pada program peningkatan sarana dan prasana terdapat 1 sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan umum. Adapun hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran pada program penerapan pemerintahan yang baik sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 32 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2009 PROGRAM PENERAPAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	% peningkatan kualitas pelayanan umum di Kementerian PPN/Bappenas	30 %	30%	100%

Secara umum pencapaian pengukuran sasaran terhadap indikator yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sangat baik dan berhasil, yaitu kualitas manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai baru telah mencapai keberhasilan sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

D.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja kegiatan pada program penerapan pemerintahan yang baik sesuai dengan pencapaian kinerja kegiatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 33 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009 PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK					
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	30 %	30%	100%
2	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan pelayanan umum untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pelayanan umum lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	30 %	30%	100%
3	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian PPN/Bappenas	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian PPN/Bappenas	30 %	30%	100%

Pada tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya melakukan peningkatan pelayanan umum melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kementerian PPN/Bappenas, telah memberikan pelayanan yang optimal melalui manajemen atau pengelolaan terhadap pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

Secara umum, manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai sudah mencapai pelayanan sebesar 100%. Manajemen atau pengelolaan terhadap pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Beberapa perbaikan dalam manajemen pembayaran gaji dan pegawai adalah adanya perbaikan sistem pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan satu sistem pembayaran melalui perbankan dan tidak lagi melalui cara manual, yaitu pengambilan di loket kasir. Disamping itu, juga telah dilakukan pengembangan manajemen melalui sistem pelayanan yang lebih baik, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem perpajakan pegawai. Sistem tersebut dapat memudahkan pegawai untuk mengetahui informasi tentang seluruh pajak yang dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan, Kementerian Keuangan. Keseluruhan manajemen atau

pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan telah dilaksanakan lebih efektif dan efisien serta telah mencapai keberhasilan yang memuaskan.

2. Manajemen atau pengelolaan pelayanan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai

Untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai telah dilakukan perbaikan manajemen atau pengelolaannya. Adapun perbaikan manajemen atau pengelolaan tersebut adalah penataan gedung dan ruang kerja serta fasilitas pendukung lainnya, mendukung mobilitas pelaksanaan kegiatan pimpinan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas antara lain, sistem kehadiran pegawai melalui *sistem finger scan*. Keseluruhan manajemen atau pengelolaan pelayanan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai lembaga atau pegawai telah dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai keberhasilan yang memuaskan.

3. Manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan negara melalui penataan manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian PPN/Bappenas telah dilakukan berbagai pelaksanaan kegiatan meliputi pengembangan sistem pengelolaan aset-aset milik Kementerian PPN/Bappenas, meningkatkan kinerja dalam proses verifikasi pengelolaan anggaran termasuk dalam pencairan anggaran. Penataan manajemen juga dilakukan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kegiatan dan anggarannya serta pelaksanaan oleh pengelola anggaran.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan manajemen atau pengelolaan pelayanan secara umum di Kementerian PPN/Bappenas adalah: 1) masih kurangnya pengawasan secara rutin dalam memonitor pemanfaatan seluruh fasilitas-fasilitas yang tersedia sehingga bisa membuat kekurangnyamanan; dan 2) perlunya perluasan lahan di gedung Kementerian PPN/Bappenas khususnya lahan parkir dan ruangan kerja. Untuk itu, akan terus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) peningkatan pengawasan yang lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik; 2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya pemerintah DKI dalam pemanfaatan lahan yang letaknya tidak jauh dari Kementerian PPN/Bappenas, mengingat tingginya intensitas kegiatan koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dengan instansi terkait lainnya baik dengan pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga asing.

E. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara (PPAAN) diarahkan untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan dan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Program ini dilaksanakan oleh dua unit kerja eselon II, yaitu Inspektorat Bidang Administrasi Umum (IBAU) dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan (IBKK).

E.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Program PPAAN terdapat sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kelembagaan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan indikator sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 34 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2009 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	Pengurangan temuan pemeriksaan lembaga eksternal	40 %	69 %	172 %
		Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	*)	*)

*) belum ada opini Laporan Keuangan tahun 2009 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

1. Pengurangan temuan oleh lembaga eksternal

Pada tahun 2009, pengurangan temuan pemeriksaan lembaga pemeriksa eksternal (BPK dan BPKP) terealisasi melebihi 100% dari targetnya sebesar 40%. Realisasi pengurangan temuan tahun 2009 secara nominal berjumlah Rp 559.733.785 atau berkurang 69% dari total temuan lembaga pemeriksa eksternal di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2009 yang berjumlah Rp 802.658.169.

2. Tindakan lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan tupoksi kelembagaan

Dalam tahun 2009 sudah ditargetkan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya. Realisasi atas target opini

tersebut belum dapat diukur karena sampai saat LAKIP tahun 2009 ini disusun pemeriksaan oleh BPK sementara berlangsung dan belum ada opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2009.

Peningkatan kualitas laporan keuangan tahun 2009 yang ditargetkan adalah capaian opini WTP dengan pengurangan atas catatan permasalahan BPK pada laporan keuangan. Pada tahun 2008, catatan BPK atas laporan keuangan berkenaan dengan aset dan hibah, sedang pada tahun 2009 diharapkan catatan berkurang hanya untuk masalah aset. Untuk pengelolaan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian PPN/Bappenas.

E.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pada tahun 2009, inspektorat semakin meningkatkan intensitas fungsi penyediaan jasa konsultasi (*consulting*), antara lain berupa seminar ketaatan, layanan informasi tiap saat (*help desk*) dan pelatihan. Pelaksanaan fungsi ini mendapat sambutan antusias dari seluruh unit kerja. Hal ini merupakan indikator adanya kebutuhan yang besar terhadap jasa konsultasi yang terkait dengan ketaatan pada peraturan dan *good governance*. Untuk itu, perlu dilakukan perkuatan fungsi *consulting* sejalan dengan perubahan paradigma audit internal, tidak lagi semata-mata sebagai *watchdog* melainkan lebih menjadi katalisator. Inspektorat perlu lebih mengedepankan fungsi pencegahan daripada penindakan. Audit tahap perencanaan (*pre audit*) mendapat prioritas lebih tinggi dibanding audit setelah kegiatan (*post audit*).

Penajaman fokus inspektorat ke arah *consulting* tidak berarti meninggalkan fungsi *assurance*, yaitu memberi jaminan memadai bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien dan efektif dengan mematuhi aturan. *Assurance* yang merupakan fungsi dasar unit pengawasan, dilaksanakan inspektorat dalam kegiatan pemeriksaan operasional, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun target pencapaian pelaksanaan kinerja kegiatan pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara sebagaimana tabel di bawah ini.

<p style="text-align: center;">Tabel 35 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA</p>					
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja Tupoksi Kelembagaan yang Dihasilkan pada Tahun 2009.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan yang dihasilkan pada tahun 2008.	9 LHP	9 LHP	100 %
2	Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan dan Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan.	Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan tupoksi kelembagaan.	50%	50%	100 %
3	Pengembangan atau Penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen	Jumlah masukan pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian manajemen	4 Masukan	4 Masukan	100 %
4	Identifikasi Peraturan yang Bermasalah dalam Pengelolaan Anggaran dan Pengelolaan Tupoksi Kelembagaan.	Jumlah peraturan yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan tupoksi kelembagaan.	6 buah	6 buah	100 %
5	Reviu atas Laporan Keuangan, dan LAKIP	Jumlah Laporan Reviu atas laporan keuangan, LAKIP dan TOR/RAB	5 Lap	5 Lap	100 %
6	Reviu atas TOR/RAB	Jumlah Laporan Reviu atas TOR/RAB	15 Lap	15 Lap	100 %
7	Seminar Ketaatan	Jumlah seminar ketaatan yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	100%

Pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dan represif yaitu usulan penindakan atas kesalahan pegawai, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan

Kegiatan pemeriksaan keuangan dan kinerja kelembagaan pada tahun 2009 telah dilakukan sebanyak 9 kali atau menghasilkan sebanyak 9 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari 9 LHP tersebut, 3 LHP terkait pemeriksaan audit kajian tahun 2008 dan pemeriksanaan audit manajemen tupoksi unit kerja yang dilakukan IBKK, sedangkan sisanya 6 LHP merupakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan IBAU. Berdasarkan tabel di atas, kegiatan mengenai pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan yang dihasilkan pada tahun 2009, telah mencapai realisasi 100 % sesuai target yang direncanakan. Kegiatan pemeriksaan yang sudah terlaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan investigasi terhadap rekening Kementerian/Lembaga tahun tahun 2008.

- 2) Pemeriksaan pembayaran honorarium (OJ) kegiatan kajian/evaluasi dan prakarsa strategis tahun 2008.
- 3) Kegiatan *current audit* terhadap tindak lanjut *pre audit* atas TOR dan RAB Bagian Anggaran 55 tahun 2009.
- 4) Kegiatan pemeriksaan operasional kegiatan penyusunan database tahun 2005- 2008.
- 5) Kegiatan pemeriksaan atas Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan tahun 2008
- 6) Audit penyerapan anggaran Bappenas tahun 2009.
- 7) Pelaksanaan audit kinerja program/kegiatan untuk kegiatan kajian isu strategis dan prakarsa strategis terhadap 43 UKE II, 5 Staf Ahli, dan 5 UKE I dengan jumlah kajian UKE II sebanyak 48 kajian , UKE I dan Staf Ahli sebanyak 15 kajian.
- 8) Pelaksanaan audit manajemen tupoksi terhadap a) Biro Humas Masyarakat dan TU Pimpinan; b) Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan tahun 2008.

2. Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan Dan Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan Inspektorat, BPK dan BPKP.

- 1) Saldo temuan pemeriksaan BPKP atas Kementerian PPN/Bappenas telah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2009 IBAU telah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP pada 3 propinsi, yaitu Kalimantan Barat, Riau dan Bengkulu dengan hasil temuan yang sudah ditindaklanjuti pada ketiga propinsi tersebut sebesar Rp 19,2 juta.
- 2) Tindak lanjut rekomendasi temuan audit manajemen tupoksi tahun 2008 belum dapat terlaksana secara maksimal.
- 3) Tindak lanjut rekomendasi terhadap audit kajian telah terpenuhi dengan diserahkannya dokumen-dokumen pendukung dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan/Ketidaksepakatan.

3. Kegiatan Non Pemeriksaan

Selain melakukan kegiatan pemeriksaan, IBAU juga melakukan kegiatan non pemeriksaan untuk mendukung fungsi-fungsi pengawasan sebagai internal auditor, yaitu:

1) Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008 (Bagian Anggaran 55 dan 999) Periode Semesteran dan Tahunan, dan Reviu atas LAKIP Bappenas Tahun 2008

Kegiatan ini bertujuan memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam LAKIP maupun Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas sebelum disampaikan ke Departemen keuangan dan diaudit oleh BPK. Selama tahun 2009 telah dilakukan sebanyak 5 kali kegiatan reviu laporan keuangan, yaitu:

- Reviu Laporan Keuangan Bagian Anggaran 55 Semester I 2009
- Reviu Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999 Semester I 2009
- Reviu Laporan Keuangan Bagian Anggaran 55 Tahun 2009
- Reviu Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999 Tahun 2009
- Reviu LAKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

2) Reviu atas TOR dan RAB Kegiatan di Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2010

Kegiatan ini bertujuan agar perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam TOR dan RAB, terhindar dari resiko adanya penyimpangan dalam tahap perencanaan kegiatan dan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan reviu atas TOR dan RAB dilakukan secara *joint* dengan IBKK terhadap seluruh dokumen perencanaan kegiatan unit kerja eselon II di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam tahun 2009 telah dilakukan reviu atas 234 TOR/RAB dan hasilnya berupa Laporan Hasil Reviu sebanyak 15 laporan.

3) Seminar Ketaatan Pengawasan Anggaran

Kegiatan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta menyamakan persepsi mengenai peraturan terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Seminar-seminar yang telah dilaksanakan selama tahun 2009 adalah:

- a. “Kasus Pengadaan Yang Sampai Pengadilan”, pada tanggal 25 Juni 2009, dengan Pembicara Setya Budi Arijanta, SH, KN (Kasubdit Saksi Ahli, LKPP) dan Mulyana, Ak (Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I, BPKP), dihadiri oleh 82 peserta.

- b. “Bahaya Substansi Tanpa Administrasi”, pada tanggal 21 Agustus 2009, dengan Pembicara Amien Sunaryadi, Ak, MPA, CISA, (Ex Pimpinan KPK), dihadiri oleh 79 peserta.
- c. “Kagum Dampak Hukum”, pada tanggal 13 Oktober 2009, dengan Pembicara Soekardi Hoesodo, Msoc, Sc, CISA, QIA, CFE, Ak (Ex Deputi Kepala BPKP Bidang Perencanaan dan Analisa) dan Adnan Paslyadja, SH, dihadiri oleh 82 peserta.

4) Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja

Untuk lebih mengembangkan konsep Pengawasan yang ada dalam Permen No. PER.009/M.PPN/12/2007 menjadi lebih operasional, diperlukan adanya peraturan yang mengatur secara khusus tatacara/pedoman audit/pengawasan manajemen tupoksi dan program/kegiatan. Untuk itu pada tahun anggaran 2009, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan melakukan serangkaian kegiatan “Penyusunan Penilaian Pengawasan Manajemen Tupoksi dan Program/Kegiatan” yang tersusun dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja. Kajian Pedoman ini merupakan model untuk menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam menerapkan Permen Nomor 009 Tahun 2007. Dengan tersusunnya pedoman ini diharapkan kegiatan pengawasan kinerja manajemen dapat dilakukan dengan lebih sistematis, valid, dan memenuhi aturan keprofesionalan Audit Internal yang baik.

Penyempurnaan terhadap kajian pedoman ini diharapkan akan memudahkan bagi narasumber internal (Biro Hukum) dalam menyusun juklak (pedoman pelaksanaan) dalam bentuk yang lebih simpel dan berbahasa hukum.

5) Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja

Seiring dengan perjalanan kegiatan audit kinerja yang telah dilakukan selama ini dan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan audit, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan substantif tentang kriteria-kriteria audit. Sejalan dengan perubahan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem informasi pengawasan kinerja. Sistem Informasi Kinerja dan website yang telah dibangun oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan (IBKK) adalah sebagai wadah publikasi produk atau output dari kegiatan audit dan pengembangan sistem audit kinerja yang telah dilaksanakan.

Pengembangan sistem informasi yang dilakukan pada tahun 2009 adalah untuk lebih mengoptimalkan hasil dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan audit. Pengembangan

sistem dan kerangka kerja audit kinerja pelaksanaannya akan dilakukan secara transparan dan penyusunan laporan hasil audit disusun secara terstruktur yang mudah diakses oleh pemeriksa yang berkepentingan, dan khususnya auditee/obrik. Oleh karena itu pada tahun 2009, telah dikembangkan sistem database yang tujuannya untuk mendapatkan format yang lebih *reliable* dan sesuai dengan kebutuhan (*applicable*). Hal ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan dalam membantu pimpinan unit kerja/lembaga Bappenas dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja kelembagaan.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2009, Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 601,977 miliar yang terdiri dari sebesar Rp. 309,925 miliar untuk rupiah murni (51%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 292,053 (49%). Dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 601,977 miliar dibagi ke dalam beberapa program dan telah direalisasikan, yaitu

1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 195,997 miliar yang terdiri dari Rp. 141,174 miliar (72%) untuk rupiah murni dan untuk PHLN sebesar Rp. 54,882 miliar (28%). Sedangkan realisasi penyerapan anggaran untuk program ini pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 141,101 miliar (71,99%) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 126,823 miliar (89,83%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 15,084 miliar (27,52%).
2. Program Pengelolaan SDM Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 111,200 miliar yang terdiri dari Rp. 31,199 miliar (28%) untuk rupiah murni dan untuk PHLN sebesar Rp. 80,0 miliar (72%). Sedangkan realisasi anggaran untuk program ini pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 60,732 miliar (54,62%) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 26,526 miliar (85,49%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 69,966 miliar (42,57%).
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 20,308 miliar. Sedangkan realisasi anggarannya untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 15,231 miliar (74,76%)

4. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 69,704 miliar. Sedangkan realisasi anggaran untuk program ini pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 56,905 miliar (81,57%).
5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3,500 miliar. Sedangkan realisasi anggaran untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 3,188 miliar (91,09%).
6. Program lainnya yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pembiayaan Lain-lain mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 201,267 miliar terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 44,037 miliar dan PHLN sebesar 157,230 miliar. Sedangkan realisasi anggaran untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 67,591 miliar (33,58%) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 41,580 miliar (94,42%) dan untuk PHLN sebesar RP. 26,011 miliar (16,54%).

Anggaran sebesar Rp. 601,977 miliar terdiri dari bagian anggaran 55 dan 999, tidak seluruhnya untuk membiayai kegiatan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Sekitar 40% dari Rp. 601,977 miliar tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pendukung dan atau sesuai penugasan Presiden sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam Bab II.

Tabel 36
Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas
Sampai Dengan Akhir Desember Tahun 2009

No	Rincian	PENYEDIAAN DANA			REALISASI PELAKSANAAN DANA					
		Rupiah Murni	PHLN	Jumlah	Rupiah Murni	%	PHLN	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/3	8	9=8/4	10=6+8	11=10/5
A	ANGGARAN 55	265.887.778.600	134.822.322.000	400.710.100.600	228.675.373.770	86,00	85.051.185.834	63,08	313.726.559.604	78,29
I	PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK	69.704.200.000		69.704.200.000	56.905.872.884	81,57	-	-	56.905.872.884	81,64
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA	3.500.000.000		3.500.000.000	3.188.098.691	91,09	-	-	3.188.098.691	91,09
III	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	141.174.879.000	54.822.322.000	195.997.201.000	126.823.530.640	89,83	15.084.697.196	27,52	141.908.227.836	72,40
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	31.199.999.600	80.000.000.000	111.200.000.000	26.526.029.482	85,49	69.966.488.638	42,57	96.492.518.120	86,77
V	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	20.308.700.000		20.308.700.000	15.231.842.073	74,76	-	-	15.231.842.073	75,00
B	ANGGARAN 999	44.037.139.000	157.230.642.000	201.267.781.000	41.580.343.647	94,42	26.011.432.913	16,54	67.591.776.560	33,58
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	15.028.104.000	157.230.642.000	172.258.746.000	14.216.415.227	94,60	26.011.432.913	16,54	40.227.848.140	23,35
VII	PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	29.009.035.000		29.009.035.000	27.363.928.420	94,33	-	-	27.363.928.420	94,33
	JUMLAH	309.924.917.600	292.052.964.000	601.977.881.600	270.255.717.417	87,20	111.062.618.747	38,03	381.318.336.164	63,34

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2009 sesuai tugas pokok dan fungsi telah diuraikan dalam Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja. Keberhasilan tersebut diukur dari pencapaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode 2005-2009 dan Rencana Kinerja Tahun 2009. Rencana Kinerja Tahun 2009 merupakan bagian dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2005-2009.

Sesuai dengan tugasnya, Kementerian PPN/Bappenas harus menyiapkan dan mengkoordinasi penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional untuk jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam melakukan tugas tersebut Kementerian PPN/Bappenas senantiasa berupaya melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pada instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat maupun pelaku usaha swasta. Penetapan target-target dalam rencana pembangunan nasional tersebut dilakukan melalui suatu proses partisipatif para pemangku kepentingan, dengan mekanisme proses perencanaan dari tingkat bawah (*bottom up planning*) dan proses perencanaan dari atas (*top down planning*).

Keluaran atau *output* dari penyusunan rencana tersebut adalah rancangan rencana pembangunan nasional, yang kemudian dibahas sesuai peraturan yang berlaku dan ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKP). Penetapan tersebut merupakan hasil (*outcome*) dari keluaran di atas. Selanjutnya, seluruh dokumen rencana pembangunan nasional tersebut menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan di instansinya masing-masing. Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan di atas, merupakan dampak (*impact*) dari keluaran kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas.

Selain tugas utama dalam perencanaan pembangunan nasional, pada kenyataannya Kementerian PPN/Bappenas menerima banyak penugasan Presiden baik yang bersifat sektoral/bidang, daerah/wilayah, maupun yang bersifat lintas sektoral/bidang dan lintas

daerah/wilayah. Umumnya, tugas-tugas tambahan tersebut bersifat koordinasi strategis dan tidak jarang yang bersifat mendesak sehingga harus segera diselesaikan. Misalnya, penugasan untuk koordinasi penanganan perubahan iklim (*climate change*), serta koordinasi kegiatan reformasi audit (*state audit reform-sectoral development project*, STAR SDP). Semua penugasan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas dinilai memiliki kompetensi, dan kredibilitas menangani tugas-tugas strategis.

Disadari, walaupun pada umumnya kegiatan berhasil dilaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, namun hal itu bukan berarti tidak menghadapi hambatan. Cukup banyak permasalahan atau hambatan pokok yang harus diselesaikan, antara lain:

- 1) Rencana pembangunan (khususnya RKP) yang telah ditetapkan seringkali menghadapi perubahan lingkungan strategis, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan krisis keuangan global, dan perubahan atau dinamika ekonomi global lainnya. Konsekuensinya, perlu dilakukan penyesuaian target-target dalam dokumen rencana pembangunan (RPJM dan RKP).
- 2) Masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan pemerintah melalui APBN dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJP, RPJM dan RKP.

Melihat permasalahan atau hambatan pokok tersebut di atas, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasinya, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan terus peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
- 2) Mendorong kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk turut membiayai pembangunan antara lain untuk kelompok barang-barang publik (*public goods*) yang memerlukan investasi besar khususnya dalam pembangunan infrastruktur berskala besar. Dalam hal ini, Pemerintah dan Swasta telah menyusun rencana usulan pembangunan infrastruktur berskala besar yang di terbitkan melalui *Public Private Partnersip* (PPP) Book,

- serta penyusunan konsep kebijakan PPP dan membentuk komite kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur (KKPPI).
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas agar lebih mampu dan cepat dalam memprediksi atau mendeteksi secara dini (*early warning system*) perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif.
 - 4) Melanjutkan reformasi birokrasi dengan fokus pada pengembangan manajemen kinerja sesuai dengan dokumen Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.

--- 000 ---

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2005-2009

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN
USAHA KECIL MENENGAH**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN
USAHA KECIL MENENGAH**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN
USAHA KECIL MENENGAH**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN
USAHA KECIL MENENGAH**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
EKONOMI**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
EKONOMI**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
EKONOMI**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
EKONOMI**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SARANA DAN PRASARANA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SARANA DAN PRASARANA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SARANA DAN PRASARANA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
SARANA DAN PRASARANA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
PENDANAAN PEMBANGUNAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
PENDANAAN PEMBANGUNAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
PENDANAAN PEMBANGUNAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
PENDANAAN PEMBANGUNAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

**KEDEPUTIAN BIDANG
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2009

INSPEKTORAT UTAMA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

INSPEKTORAT UTAMA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009

INSPEKTORAT UTAMA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

INSPEKTORAT UTAMA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

RKT LEMBAGA

RKT UNIT KERJA ESELON I

RKT UNIT KERJA ESELON II

PK LEMBAGA

PK UNIT KERJA ESELON I

PK UNIT KERJA ESELON II

PPS LEMBAGA

PPS UNIT KERJA ESELON I

PPS UNIT KERJA ESELON II

PPS UNIT KERJA ESELON II

UNIT KERJA ESELON II

UNIT KERJA ESELON I

RKT UNIT KERJA ESELON II

**MASUKKAN
PENGUKURAN
KINERJA**

TAHUN 2009

**MASUKKAN
RENCANA
KINERJA**

TAHUN 2009

**LAMPIRAN
LAPORAN
KINERJA**

TAHUN 2009